



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI XI DPR RI**

- Tahun Sidang : 2018-2019
- Masa Persidangan : III
- Rapat ke- : 4
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Dengan : Menteri Keuangan
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Rabu, 16 Januari 2019
- Waktu : 14.50 WIB s.d 18.03 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
- Ketua Rapat : Melchias Markus Mekeng
- Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono
- Acara : 1. Pembahasan Perekonomian 2019;
2. Kinerja LPEI Tahun 2018 dan Rencana Kerja 2019.
- Hadir : **PEMERINTAH:**
1. MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI INDRAWATI)
 2. MENTERI PPN (Prof. Dr. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO)
 3. KEPALA BPS (Dr. SUHARIYANTO)
 4. GUBERNUR BI (PERRY WARJIYO)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MELCHIAS MARKUS MEKENG/F-PG):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Kepala Badan Pusat Statistik beserta jajarannya,
Yang terhormat Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,
Serta hadirin yang berbahagia.**

Menurut catatan yang kami terima dari Sekretariat, daftar hadir telah ditandatangani oleh 12 orang Anggota dari 51 dan dari 6 fraksi. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, ijin kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala BPS tentang *outlook* perekonomian Indonesia tahun 2019 dan rapat dinyatakan dibuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.50 WIB)

Pertama-tama mari kita panjatkan puji and syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita bisa menghadiri Rapat Kerja pada siang hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kami dari Komisi XI DPR RI mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak dan Ibu sekalian, semoga di tahun 2019 kita bisa semakin meningkatkan kinerja kita demi bangsa dan negara.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Agenda Rapat Kerja kita adalah mendengarkan tentang *outlook* perekonomian tahun 2019. Dan yang kedua tentang LPI kami memutuskan untuk kita tunda ke rapat berikutnya. Jadi kita fokus kepada *outlook* perekonomian tahun 2019.

Bisa disetujui ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Ini sekarang jam 14.50 WIB, kalau bisa kita sepakati jam 17.00 WIB sudah bisa kita sudah. Bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada saudara Menteri Keuangan untuk memberikan penjelasan tentang *outlook* perekonomian 2019.

Kami persilakan.

MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI IDRAWATI):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saya pertam-tama ingin menyampaikan selamat tahun baru kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI. Selamat tahun baru dan kita berharap tahun 2019 tentu lebih baik bagi kita semua.

Ijinkan kami untuk menyampaikan mungkin dua bagian, yaitu pertama melaporkan kepada Komisi XI DPR RI mengenai kinerja dari APBN 2018. Dan itu juga sebagai pengantar untuk kita membahas perekonomian tahun 2019.

Pertama, mengenai kinerja dari APBN 2018, apabila kita lihat dari asumsi yang mendasari tahun 2018 yang kemudian juga menghasilkan kinerja dari APBN 2018. Kita lihat dipaparan ini pertumbuhan ekonomi tahun 2018 estimasi kami ada 5,15% dibandingkan dengan asumsi awal 5,4. Inflasi 3,13% dibandingkan dengan 3,5% dari asumsi. Ini semuanya kalau dibandingkan tahun 2017 ada disisi sebelah kirinya.

Nilai tukar tingkat bunga SPN 3 bulan realisasi 4,95 dibandingkan dengan asumsi APBN 5,2%. Dan nilai tukar tahun 2018 secara rata-rata ada 14.247 dibandingkan dengan asumsi awal 13.400. Harga minyak realisasinya adalah 67,5 Dolar per barel dibandingkan dengan asumsi 48 dan untuk lifting minyak serta lifting gas agak di bawah dari asumsi 776 untuk lifting minyak ribu per barel dan lifting gas 1136 ribu per barel setara minyak. Dibandingkan dengan asumsi, yaitu 800 dan 1200.

Dengan kondisi realisasi dari asumsi makro yang terjadi di tahun 2018 dan yang di sebelah kanan adalah yang kita gunakan untuk APBN 2019, maka kami ingin menyampaikan beberapa catatan kinerja dari tahun 2018 APBN.

Dari keseluruhan *account* kita pendapatan negara kita mencapai 1.942,3 triliun atau 102,5% dari Undang-Undang APBN sebesar 1.894,7 triliun. Pendapatan ini artinya....

KETUA RAPAT:

Pertama kali Ibu ya, pertama kali tercapai dalam kurun waktu berapa kali.

MENTERI KEUANGAN RI:

Pertama kali sejak 2012 waktu saya jadi Menteri Keuangan juga pernah beberapa kali.

KETUA RAPAT:

Makanya jadi *the best minister of finance*.

MENTERI KEUANGAN RI:

Pertumbuhannya adalah 16,6% kalau dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 7,1% ini tentu sesuatu yang membedakan. Dan ini didukung oleh 2, yaitu perpajakan dan PNBPN.

Untuk penerimaan perpajakan pertumbuhan 13,2 atau 1.521,4 dari target 1.618 atau masih 94% dari target. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak tumbuh 30,8% kolom paling akhir atau dalam hal ini capaiannya 147,8% dari APBN, yaitu 407,1 triliun.

Kita juga mendapatkan penerimaan dari sisi hibah yang meningkat, ini sebagian besar adalah hibah dari Pemerintah Pusat kepada Daerah, yaitu dari yang tadinya 1,2 menjadi 13,9. Dengan demikian kita mencatatkan penerimaan negara sebesar yang tadi saya sebutkan 1.942,3 triliun.

Dari sisi belanja juga ada perbaikan, total realisasi belanja negara 2.202,2 triliun atau tumbuh 9,7% dari tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhannya untuk belanja negara sebesar 7,7%, jadi ini tetap juga perbaikan. Angka belanja negara ini berarti 99,2% dari anggaran yang disediakan di tahun 2018, hampir mencapai 100%. Untuk Pemerintah Pusat belanja mencapai 99,3% juga atau terealisasi 1.444,4 triliun. Artinya, belanja Pemerintah Pusat tumbuh 14,2% dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar 9,6.

Belanja Kementerian/Lembaga adalah 98,7% dari budget atau 836,2. Ini juga angka yang jauh lebih baik dari sisi realisasi dibandingkan tahun lalu yang hanya 95,8%. Itu kita pertumbuhannya berarti 9,3% dari total belanja tahun lalu. Belanja non KL yang mengalami kenaikan cukup besar, yaitu 608,2 atau 100,2% atau tumbuhnya 21,6% dibandingkan belanja tahun lalu.

Untuk transfer ke daerah hampir terealisasi juga keseluruhannya dimana transfer ke daerah terealisasi 98,8% karena total dari belanjanya memang tidak terlalu berbeda jauh itu adalah tumbuh hanya 2,3%. Dana desa dalam hal ini hampir 100% semuanya tersalurkan, yaitu 59,9 triliun dari alokasi 60 triliun.

Dengan pendapatan negara yang positif dan kuat serta belanja negara yang juga positif dan kuat, namun belanja negara lebih rendah dari sisi *growth*-nya, maka kami pada akhir tahun 2018 dapat menjaga defisit anggaran lebih rendah dari yang ada di dalam Undang-Undang APBN, yaitu 259,9 triliun atau 1,76% dari GDP. Di dalam Undang-Undang APBN kita adalah 325,9 triliun atau 2,19. Biasanya kalau dalam praktek internasional yang dibandingkan tentu bukan dengan Undang-

Undang-nya tetapi dengan apa yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya.

Jadi kalau dilihat dari tahun sebelumnya maka defisit kita menurun dari 2,51% dari GDP menjadi 1,76 dari GDP. Itu adalah suatu penurunan yang sangat tajam dalam ukuran untuk sebuah *fiscal policy* suatu negara atau kalau sisi nominalnya juga dari 341 triliun defisit tahun lalu yang ada di dalam LKPP tahun 2018 *un audited* adalah 259,9 triliun atau penurunan hampir mendekati 100 triliun sendiri.

Nah, dengan hal ini keseimbangan primer kita hanya sebesar 1,8 triliun negative, hampir nol positif. Kalau dibandingkan dengan keseimbangan primer di dalam Undang-Undang 87 memang lebih rendah tetapi perbandingannya sebetulnya yang lebih pantas adalah dengan keseimbangan primer tahun lalu yang sebesar 124,4 triliun. Jadi kita menurunkan keseimbangan primer lebih dari 120 triliun sendiri hanya dalam waktu 12 bulan. Ini adalah suatu pencapaian yang sangat baik.

Pembiayaan negara anggaran mencapai 300 triliun dalam hal ini lebih rendah hampir 25 triliun atau 26 triliun dibandingkan anggaran awal atau 66 triliun dibandingkan tahun lalu LKPP. Dan pada akhir tahun anggaran 2018 kami memiliki kelebihan pembiayaan sebesar 40,5 triliun.

Pimpinan dan para Anggota yang terhormat.

Kami ingin sampaikan sedikit mengenai bagaimana APBN itu dikelola dari beberapa tahun yang lalu, sehingga juga untuk memberikan *sense* mengenai konteksnya. Defisit APBN yang tadi kami sampaikan 1,76% atau 259,9 triliun kalau kita bandingkan dalam 10 tahun terakhir ini adalah suatu kemajuan atau dalam hal ini adanya *turning point* dari kebijakan fiskal kita. Ini penting pada saat kita perlu untuk menciptakan apa yang disebut dengan *fiscal space* kalau kita nanti memasuki ketidakpastian global. Jadi APBN kita sehat dan kuat dan itu penting pada saat nanti kita kadang harus menghadapi situasi global yang kadang-kadang tidak ramah.

Dan kalau dilihat dari keseimbangan primer yang tadi mendekati nol ini terlihat juga dalam siklus gambar yang sebelah kanan perbandingan selama 10 tahun terakhir, juga untuk memberikan suatu perspektif mengenai upaya kita untuk menyehatkan dan memperbaiki kebijakan fiskal kita agar terus mampu menjadi instrument yang efektif dan sehat bagi pengelolaan ekonomi.

Dari sisi pertumbuhan penerimaan perpajakan, ini juga untuk bisa memberikan gambaran mengenai ekonomi Indonesia 2018 yang kami akui tidak mudah. Gubernur dan saya barangkali yang memiliki testimoni bagaimana kita betul-betul harus memperhatikan volatilitas dan gonjang-ganjing tahun 2018 itu. Namun, kalau kita lihat kegiatan ekonomi kita dari sisi perpajakan itu menunjukkan suatu denyut yang luar biasa sangat impresif.

PPH Migas kita memang kan harga minyak dari tadinya asumsi 48 realisasinya di 67 terlihat meningkat dari yang tadinya di anggaran disebutkan 38 triliun realisasinya 64. Jadi realisasi jauh lebih tinggi 169 atau gross-nya 28,6%. Tahun lalu PPH Migas grossnya juga sudah tinggi 39,4%. Jadi dalam hal ini untuk migas memang masih ada dinamika positif kenaikan harga dari semenjak tahun 2016 momentumnya ke 17 dan berlanjut di tahun 2018.

Namun, pajak non migas itu menggambarkan juga hal yang sama kuatnya. Pertumbuhan penerimaan pajak non migas kita ada 13,7 itu garis yang hijau dibandingkan tahun lalu yang hanya tumbuh 2,9 ini berarti kegiatan non migas itu momentumnya menguat sekali. Gross pajak tahun lalu hanya 2,9% tahun ini 13,7% meskipun kalau dilihat dari capaiannya 90% dari total penerimaan. Namun, dilihat dari gross-nya menunjukkan bahwa ada denyut yang cukup signifikan. Dan kalau dilihat dari dekomposisinya PPH Non Migas kita tumbuhnya 15,1%.

Mungkin untuk Pimpinan dan para Anggota membandingkannya tahun lalu yang PPH Non Migasnya justru mengalami kontraksi 5,3. Ini yang kami sampaikan bahwa dinamika itu terasa dan terlihat dan bahkan bisa kita tangkap melalui penerimaan perpajakan kita.

Kalau PPH Non Migas tumbuh 15,1 atau 686,8 itu realisasinya memang masih tetap di bawah target, namun gross-nya menggambarkan swing yang sangat besar dari negative gross menjadi positif gross. Demikian juga dengan PPN, meskipun untuk PPN kami melihat pertumbuhannya relative lebih rendah dari tahun lalu, tahun lalu tumbuh 16,6 dan tahun ini 11,9 atau mendekati 12%. Namun, PPN ini hampir mendekati 100%. Ini menggambarkan lagi *double digit gross* di level 11,9 dibandingkan dengan APBN kita yang tumbuh 5,15. Ini berarti ada sesuatu hal yang sifatnya positif dan ada intensifikasi dari penerimaan perpajakan.

PBB kita mencapai 119,9% atau 15,9 tapi dari *magnitude* angkanya hanya 19 triliun. Dan pajak lain adalah tumbuhnya hampir flat atau 0,9%. Cerita yang positif juga selain pajak ada dari kepabeanan dan cukai. Cukai kita teraliris 102,8% atau 159,7 triliun. 2 tahun berturut-turut cukai kita mencapai target, ini sesuatu yang merupakan kinerja yang sangat baik. Saya senang dan saya minta kepada Dirjen Bea Cukai untuk terus menjaga momentum itu, karena rokok ilegal kita bisa tekan dari yang tadinya 12% terjadinya rokok ilegal sekarang hanya 7%. Kami minta untuk Dirjen Bea Cukai menurunkan lagi ke 3%. Kemarin kami bersama-sama dengan Panglima TNI dengan Kapolri, Kejaksaan melakukan konferensi pers bersama untuk terus meningkatkan kerjasama diantara instansi ini.

Bea masuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tercapai 39 triliun atau 109,3% atau tumbuh 11,3% dibandingkan tahun lalu yang 8%. Dan bea keluar ini tentu dengan adanya harga komoditas mengalami realisasi yang lebih besar, yaitu 6,8 triliun dibandingkan 3 triliun atau naik sebesar 63,1%. Ini kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun lalu.

Jadi dari hal ini kita melihat bahwa keseluruhan komponen penerimaan perpajakan menggambarkan denyut ekonomi kita yang cukup positif atau sangat positif. Dan inilah yang membuat kami terus menerus ingin melihat bagaimana cara kita menjaga momentum gross ini. Meskipun ketidakpastian masih dirasakan dan masih terus berlangsung dan juga lingkungan makronya juga semakin tidak mudah. Seperti diketahui Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sampai 7 kali dan kurs berubah serta lingkungan *environment* globalnya juga meningkat. Jadi kita juga harus berhati-hati menjaganya.

Untuk sectoral, penerimaan pajak sectoral juga meng-*confirm* pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Industri pengolahan kita yang berkontribusi 30% dari

penerimaan pajak tumbuh 11,12% atau mencapai 363,6 triliun. Agak sedikit melemah dibandingkan tahun lalu 18,2 tapi ini pertumbuhannya masih double digit di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk perdagangan yang berkontribusi hampir mendekati 20% dari total penerimaan pajak kita, tumbuhnya juga sangat kuat double digit di atas 20%, yaitu 23,7% dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 25,09%. Ini artinya sektor perdagangan dan industry mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang tumbuh cukup tinggi. Tahun lalu adalah jasa keuangan, yaitu tumbuhnya 11,9% atau menyumbangkan 162,1 triliun terhadap total penerimaan pajak. Ini lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 8,5%.

Untuk konstruksi dan real estate pertumbuhannya 6,6% hampir sama dengan tahun lalu yang 7,16%. Kontribusinya 6,9% terhadap total penerimaan pajak atau 83,5 triliun. Sektor pertambangan karena adanya kenaikan harga komoditas meningkat cukup besar 51,1% gross-nya atau menyumbangkan 80,5 triliun atau 6,6% dari total pajak.

Dan sektor pertanian kita juga masih tumbuh positif di 21% gross-nya dibandingkan tahun lalu 28, meskipun kontribusinya terhadap perekonomian kita, terhadap penerimaan pajak kita hanya 1,7% yaitu 20 triliun. Itulah yang menggambarkan kenapa sektor dari sisi supply maupun dari sisi demand menggambarkan adanya dinamika gross yang cukup positif di tahun 2018. Dengan penerimaan pajak yang menguat maka ratio pajak kita juga membaik, kita sekarang sudah mencapai 11,5% dibandingkan tahun lalu yang 10,7 atau tahun sebelumnya yang 10,8 tren inilah yang akan kita coba jaga.

Hal positif lainnya dari penerimaan negara adalah dari PNBP, ini tentu saja karena faktor sumber daya alam. Namun, tadi juga saya sampaikan faktor non komoditas sumber daya alam juga ternyata kenaikannya cukup tinggi. Untuk yang SDA ini terlihat bahwa realisasi dari pendapatannya mencapai 143,3 untuk SDA. Pendapatan SDA seluruhnya 181%, terdiri dari minyak bumi 138 triliun atau 232% dari APBN. Dan untuk gas adalah 5 triliun atau 24% dari total yang dianggarkan. Non Migas untuk pendapatan SDA yang non migas tercapai 37,8 triliun atau 162%.

PNBP lain yang cukup baik adalah pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan atau dari BUMN kita. BUMN kita menyumbangkan deviden 45 triliun atau 44,7. Jadi artinya BUMN kita positif membukukan profit atau ini 100% dari yang kita anggar. PNBP lain mencapai 127 triliun atau 151% dari yang dianggarkan dan pendapatan BLU juga mengalami kenaikan yang cukup besar. Ada korelasi dengan harga ICP seperti yang bisa kita prediksi terutama pendapatan dari SDA, tapi yang dibawah nomor 2, 3 dan 4 adalah karena Kementerian/Lembaga maupun dari BUMN.

Dari sisi belanja mungkin kalau di *break down* dari belanja pegawai, barang dan belanja modal serta Bansos. Kami sampaikan semuanya menunjukkan angka yang cukup positif untuk belanja pegawai mencapai 101,4%. Ini karena ada realisasi dari tambahan Tunkin dan juga belanja barang mencapai 99,4%. Sedangkan belanja modal terealisasi 90,7% agak dibawah dari tahun lalu. Sementara bantuan sosial meningkat menjadi 108,5% dari tahun lalu. Ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa tadi belanja cukup kuat, namun untuk belanja modal mungkin ada yang

mengkhawatirkan walaupun saya akan mengatakan belanja modal itu sebagian besar adalah multiyers, jadi mereka tidak memiliki *urgency* untuk menghabiskan pada akhir tahun. Ini yang menggambarkan kenapa mereka biasanya lewat untuk satu tahun anggaran.

Penyerapan KL juga cenderung meningkat dan bahkan mencapai titik tertinggi dibandingkan 5 tahun terakhir, yaitu mencapai 98,7. Ini menggambarkan bahwa perencanaan semakin baik, KL juga semakin fokus ini juga karena tidak adanya APBNP jadi mereka betul-betul fokus dengan uang yang mereka sudah ada dan mereka membelanjakan.

Dan juga ada dukungan belanja-belanja untuk kegiatan strategis tambahan. Asian Games, Asian Paragames, penanggulangan bencana, karena ada bencana berarti kita melakukan banyak sekali yang kita alihkan dari BUN ke KL. Dan juga alokasi dari belanja untuk sosial, yaitu untuk PKH juga untuk reformasi birokrasi tadi beberapa Tunkin Kementerian/Lembaga yang sudah mencapai titik tertentu yang kemudian direalisasikan pada akhir tahun 2018.

Untuk transfer ke daerah tadi kami sampaikan mencapai hampir 100% juga terdiri dari berbagai komponen dana transfer umum mencapai 100%, dana alokasi umum 100% yaitu 401 karena memang itu yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan. DBH kita mencapai 105% karena kenaikan harga komoditas dan juga kita membayar kekurangan di bea sebelumnya. Sedangkan untuk dana transfer khusus yang perlu kita perhatikan adalah DAK fisik iturealisasinya di 93% ada sekitar 7% yang tidak terselesaikan dan DAK Non Fisik 93,4%.

Untuk yang lain hampir mendekati 100% seperti Otsus dan Dana Desa, sedangkan dana insentif daerah tercapai 96,8%. Dengan situasi ini tentunya kita lihat tadi defisitnya lebih rendah dan oleh karena itu pembiayaan kita menjadi lebih jauh menurun. Kalau kita lihat gross-nya negative 18,1 itu menggambarkan bahwa kita mengeluarkan surat utang jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu atau terjadi kontraksi 18%. SBN kita juga mengalami penurunan 18,9% dari tahun lalu yang mencapai 441 tahun ini 358. Dengan hal tersebut, kita masuk tahun 2019.

Mungkin beberapa yang perlu untuk kita perhatikan maupun waspadai, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan mengalami perlemahan. Ini sudah *confirm* cari berbagai macam sumber dan institusi yang melakukan *assessment* terhadap *global economic growth*. Kita memperkirakan ada di 3,7 lebih rendah dari yang tadinya 3,9.

Trade secara dunia juga mengalami perlemahan yang cukup signifikan. Gross-nya hanya akan mencapai 4% dibandingkan tahun lalu yang juga sudah melemah 4,2 dari tahun 2017. Jadi kita juga harus waspada bahwa lingkungan global kita melemah dan berarti ini akan mempengaruhi eksternal balance kita dan juga mempengaruhi beberapa sektor yang tadi telah saya sampaikan.

Pertumbuhan *advance* ekonomi mengalami perlemahan dan *developing country* mungkin relative sama di level 4,7. Kita tetap harus mewaspadai dinamika antara Amerika dengan RRT, dua ekonomi terbesar yang sekarang ini sedang di dalam situasi yang sangat tidak biasa.

Pertumbuhan global tentu juga akan mempengaruhi komoditas yang

diperkirakan mungkin tidak mengalami kenaikan namun juga tidak mengalami penurunan yang merosot tajam. Ini adalah sesuatu yang mungkin kita perlu waspadai, kita berharap tentu akan tetap stabil, karena beberapa sektor di dalam ekonomi kita sangat tergantung kepada komoditas ini.

Namun tetap kita harus siap kalau terjadi *downside risks*, meskipun proyeksi *forcase* 2019 diperkirakan *commodity price* relative akan stabil dalam posisi yang tidak meningkat. Dengan situasi itu gross tahun 2019 kami perkirakan untuk APBN 2019 seperti yang Bapak dan Ibu sekalian, tadi lihat adalah di 5,3% yang didukung oleh pertumbuhan di sisi permintaan konsumsi kita perkirakan akan tetap terjaga di atas 5,1% dan konsumsi Pemerintah juga akan tetap positif agak lebih tinggi karena memang belanja kita tahun ini lebih tinggi 5,4%. Sedangkan untuk pembentukan modal domestic bruto tetap akan tumbuh di sekitar 7% yang tahun lalu tapi tidak melonjak.

Mungkin yang tidak pasti untuk tahun 2019 adalah ekspor dan impor, karena tadi yang saya sampaikan global trade mengalami perlemahan. Tapi kita masih memperkirakan gross 6,3% dengan impor tetap tumbuh tapi lebih rendah dari tahun lalu, yaitu pertumbuhannya 7,1.

Kita juga perlu untuk mewaspadai meskipun federal fun rate dari Gubernur Bank Sentral Amerika mengatakan akan lebih sabar di dalam mengait kenaikan suku bunga, namun itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan menaikkan suku bunga. Dan tentu *trade war* antara Amerika dengan RRT menjadi salah satu resiko ketidakpastian yang harus terus kita waspadai.

Untuk tahun 2019 mungkin inflasi kami nanti Bapak Gubernur yang akan lebih tapi di APBN kita sebutkan 3,5% tapi dari sisi Pemerintah tentu saja harga minyak mentah dunia mungkin juga akan memberikan kenaikan harga energi domestic, meskipun kemarin mengalaih penurunan. Kita juga akan tetap menjaga melalui berbagai macam kebijakan subsidi maupun PSO yang bisa menjaga stabilitas harga dari administer. Dan juga kebijakan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat sehingga momentum gross terutama tadi yang disumbangkan oleh *consumption* dan *confident* tetap akan terjaga.

Saya rasa dari sisi moneter nanti disampaikan oleh Bapak Gubernur harga minyak akan saya sampaikan untuk beberapa hal yang kita pantau. Proyeksi harga minyak mentah kita bervariasi antara 55 hingga 75, jadi memang ini kesulitan kita terhadap *range*. Dan kita memperkirakan memang akan bergerak antara *range* 55-75 terus di dalam kurun waktu 2019 ini.

Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pertumbuhan global yang diperkirakan lebih tidak mengalami peningkatan atau bahkan agak relative melemah dan produksi minyak dunia yang cenderung meningkat. Kemarin mungkin beberapa saat yang lalu sempat kita baca Amerika Serikat sekarang sudah *energy safisien, self safisien*. Jadi artinya mereka sekarang sudah memproduksi sendiri jumlah produksinya yang bisa dipenuhi untuk kebutuhan dalam negeri.

Kita juga perlu untuk melihat resiko dari geo politic, terutama untuk daerah-daerah yang penghasil minyak besar, seperti Nigeria, Venejuela yang mengalami kondisi politik yang sangat tidak menentu.

Untuk lifting kami memang akan sangat khawatir untuk melihat apakah lifting tetap tercapai atau terus mengalami penurunan. Kami terus bekerja bersama Menteri ESDM dalam rangka untuk mendukung kebijakan dalam rangka meningkatkan produksi minyak dan gas. Dan ini akan kita lakukan apakah di dalam konteks *cost recovery* menjadi *gross split* maupun dari sisi insentif fiskal yang bisa kita berikan.

Kesimpulannya Bapak Pimpinan, untuk tahun 2019 pertama dengan kinerja APBN 2018 yang menunjukkan momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup *cross the board* kuat, kami masih optimis masuk tahun 2019 momentum ini akan terjaga. Meskipun kita tidak terlena dengan kemungkinan resiko. Jadi kewaspadaan tetap tinggi, namun optimisme itu landasannya ada, yaitu pencapaian di tahun 2018 yang menggambarkan momentum yang cukup tinggi.

Kinerja tahun 2018 ini akan kita tetap jaga untuk mencapai tahun 2019, sehingga fiskal tools kita akan menjadi instrument yang cukup efektif menjaga perekonomian dalam menghadapi ketidakpastian. Kita akan mengelola APBN secara lebih baik dengan optimalisasi pendapatan negara, namun pada saat yang sama menjaga kondisi iklim investasi belanja negara yang akan diupayakan terus kualitas dan tepat waktu dan program-program strategis pembangunan untuk menurunkan kemiskinan yang sekarang momentumnya sudah menunjukkan makin membaik. Dan juga pemerataan dengan gini ratio yang sudah semakin menurun. Kita akan menggunakan instrument itu untuk mendukung pembangunan yang lebih *inclusive*. Dan barang milik negara termasuk BUMN yang akan dikelola secara lebih baik dan disiplin.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia.

GUBERNUR BANK INDONESIA (PERRY WARJIYO):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.**

**Selamat siang,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo budaya,
Salam kebajikan.**

Pertama-tama kami ucapkan selamat tahun baru, *insya Allah* tahun 2019 ini perkiraan kami kinerja ekonomi kita akan lebih baik dari tahun 2018. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi makro yang terjaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan sampaikan perkiraan-perkiraan kami mengenai ekonomi makro tahun 2019 ini dan kebijakan-kebijakan apa yang ditempuh oleh Bank Indonesia di satu sisi untuk menjaga stabilitas dan disisi lain sejumlah kebijakan kami arahkan untuk bersama Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di tengah memang kondisi ekonomi global ketidakpastiannya yang masih berlanjut. Kalau boleh dari sisi global seperti tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan memang pertumbuhan ekonomi global itu melandai dan bahkan di sejumlah belahan negara itu turun. Tadi disampaikan bahwa tahun ini ekonomi dunia itu tumbuh sekitar 3 bahkan perkiraan-perkiraan terkini bukan 3,7 malah lebih rendah 3,6% tahun berikutnya juga 3,6%. Amerika yang tahun lalu tumbuhnya sangat kuat 2,9% tahun ini diperkirakan malah bisa turun ke 2,3%. Demikian juga di Eropa, Jepang, Tiongkok pun juga tahun ini diperkirakan turun menjadi 6,4% dari tahun lalu 6,6%. Negara yang memang masih cukup tumbuh baik adalah di India yang memang diperkirakan tahun ini tumbuh 7,6%.

Menggarisbawahi yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan memang kita perlu upaya-upaya ekstra yang lebih banyak untuk bagaimana mendorong ekspor kita di tengah permintaan global yang menurun untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Slide berikutnya di harga komoditas juga memang kalau tahun lalu itu sejumlah harga komoditas masih menaik, meskipun ada beberapa yang turun seperti CPO, karet tahun lalu itu turun akan tetapi beberapa komoditas seperti tembaga, batubara itu masih naik termasuk juga aluminium tahun ini nampaknya hampir semua harga komoditas itu menurun dan ini lagi-lagi ini juga menjadi tantangan kita untuk bagaimana mendorong ekspor. Demikian juga tadi volume perdagangan dunia juga turun sekitar 4%, sehingga memang upaya-upaya untuk mendorong ekspor itu menjadi suatu tantangan.

Di sektor keuangan memang slide berikutnya kami lihat bahwa Amerika Serikat juga masih akan menaikkan suku bunganya, meskipun memang mereka akan sabar, kemudian data dependent, tapi perkiraan-perkiraan masih akan menaikkan dua kali, meskipun ini lebih rendah dari perkiraan kami semula yang 3 kali. Meskipun juga pasar memperkirakan mungkin bukan dua kali, ada yang memperkirakan satu kali bahkan tidak menaikkan sama sekali. Tapi ini menimbulkan suatu ketidakpastian di sisi kebijakan moneter di global. Sementara di sejumlah bank sentral termasuk dikawasan juga akan berencana untuk menaikkan suku bunga, sehingga memang di pasar keuangan global meskipun bahwa kondisinya tidak seburuk tahun lalu tapi masih akan kita hadapi sejumlah ketidakpastian di pasar keuangan global.

Beberapa indikator memang menunjukkan bahwa arus modal asing dari global ke *a margin market* termasuk Indonesia juga sudah mulai khususnya mulai triwulan 4 tahun lalu, semoga ini juga akan berlanjut di tahun ini. Di dalam negeri kami perkiraan memang tahun ini perkiraan kami pertumbuhan ekonomi PDB 5 sampai 5,4% titik

tengahnya 5,2%. Kalau tahun 2018 itu perkiraannya hampir sama sekitar 5,1% kami perkirakan 5,13%. Tapi kalau kita lihat *break down*-nya Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, kami menggarisbawahi juga bahwa sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri atau sering disebut permintaan domestik itu masih cukup kuat. Konsumsi rumah tangga kami perkirakan bergerak tumbuh 5,1 sampai 5,5% atau sekitar 5,2%. Investasi juga tumbuh cukup baik hampir 7%, perkiraan kami 6,5 sampai 6,9%.

Ekspor memang belum bisa tumbuh cukup tinggi sekitar 6,8 sampai 7,2%. Perbedaan kami dengan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tadi 5,3% itu terutama di impor. Kami memperkirakan impornya itu lebih tinggi, sehingga net ekspornya itu negatifnya lebih tinggi, itu bedanya 5,2 kami dengan 5,3% dari Pemerintah. Tapi kesamaannya adalah sumber permintaan dalam negeri, yaitu konsumsi dan investasi tumbuh tinggi dan itu juga sebagai faktor kenapa memang penerimaan pajak itu cukup baik di samping memang upaya koleksi yang memang terus digiatkan oleh Ibu Menteri Keuangan.

Di sejumlah daerah memang di sejumlah kawasan kalau lihat tahun lalu itu cukup baik, apakah di Sumatera, di sejumlah kawasan di Sumatera tahun lalu triwulan 3 itu tumbuh 4,7% demikian juga di beberapa belahan, karena memang beberapa daerah tahun lalu masih bisa mendorong pertumbuhan ekonominya dari sisi ekspor komoditas. Tahun ini kami perkirakan agak melandai di luar Jawa, baik di Sumatera maupun di kawasan timur Indonesia. Di Sumatera kami perkirakan tumbuh sekitar 4,4 sampai 4,8%. Kawasan timur Indonesia 3,8 sampai 4,2% karena memang ekspor yang umumnya dari kawasan-kawasan luar Jawa itu lebih berbasis komoditas itu yang memang menghadapi tantangan karena menurunnya permintaan dan juga menurunnya harga komoditas.

Sementara di Jawa pertumbuhannya masih cukup baik, kami perkirakan tahun ini 5,6 sampai 6%. Inflasi kami perkirakan tahun ini 3,5% atau di titik tengah kisaran sasaran 3,5+-1% setelah tahun lalu inflasinya rendah 3,1%. Sejumlah faktor menggarisbawahi inflasi kedepan masih tetap akan rendah dan terkendali. Pertama, memang dari sisi upaya-upaya bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengendalikan harga-harga pangan itu terus berlangsung secara baik. Yang kedua, juga meskipun terjadi kenaikan permintaan kapasitas produksi dalam negeri masih memenuhi dan juga ekspektasi inflasi itu juga tetap terjaga. Kami meyakini bahwa inflasi tahun ini akan terkendali di sekitar 3,5%.

Inflasi yang terkendali memang tercatat di sejumlah daerah, slide 8 ini menggambarkan daerah-daerah yang hijau muda maupun hijau tua itu adalah daerah-daerah yang cukup berhasil mengendalikan inflasi, meskipun kami juga masih menghadapi tantangan pengendalian inflasi di sejumlah daerah di Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah maupun juga di kawasan timur Indonesia umumnya terkait dengan sejumlah faktor baik karena komoditas pangan, bencana alam maupun juga masalah distribusi harga barang dan jasa di kawasan-kawasan itu.

Di sisi eksternal sampai dengan triwulan 3 tahun lalu memang karena account defisit masih tinggi, triwulan 3 itu 8,8% sementara tahun lalu sampai kuartal 3 itu juga arus modal asing belum bergerak secara cepat. Kami perkirakan di angka-angka

sementara kami triwulan 4 tahun lalu itu secara keseluruhan neraca pembayaran itu akan mengalami surplus sekitar 4 miliar US Dolar, meskipun transaksi berjalan perkiraan kami sementara masih di sekitar 8,8 miliar. Dengan adanya arus modal asing masuk, baik PMA maupun investasi portofolio yang cukup besar di triwulan 4 tahun lalu itu angka sementara kami menunjukkan sekitar 12,5 miliar US Dolar arus modal asing masuk, sehingga secara keseluruhan neraca pembayaran mulai mengalami surplus di triwulan 4 tahun lalu.

Di tahun ini kami perkirakan defisit transaksi berjalan akan turun ke sekitar 2,5% di samping juga ada beberapa penurunan impor tetap juga karena memang sejumlah program dari Pemerintah untuk mendorong ekspor dan menurunkan impor antara lain program B20, pariwisata maupun beberapa program-program yang lain. Kami terus akan berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mengendalikan current account defisit dalam batas yang aman, yaitu tidak melebihi 3% dari PDB.

Kembali masuknya arus modal asing dan juga faktor-faktor lain mendorong Rupiah memang bergerak menguat dan stabil. Kalau tahun lalu itu depresiasi Rupiah sekitar 5,8% lebih rendah dari negara-negara lain, apakah India sekitar 12%, Afrika Selatan dan Brazil sekitar 14%. Tahun ini *year to date*-nya Rupiah mengalami penguatan *point to point*-nya sekitar 2,04. Hari ini Rupiah diperkirakan di 14.100 per US Dolar.

Secara keseluruhan ke depan kami memperkirakan Rupiah akan bergerak stabil didukung oleh sejumlah faktor. Satu, arus modal asing masuk yang memang diperkirakan masih akan terus berlanjut. Kedua, kenaikan rate yang lebih rendah. Dan ketiga, defisit transaksi berjalan yang lebih rendah. Keempat, pasar valas negeri yang semakin semakin berkembang tidak hanya pasar swap tetapi juga telah kami lakukannya pasar dalam negeri, yaitu *domestic non delivery forward* yang semakin mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Dan karena memang cadangan devisa kami yang memang sampai dengan bulan ke-9 atau 10 itu menurun dan kemudian bergerak naik pada akhir bulan lalu cadangan devisa kami adalah 120,7 miliar US Dolar atau setara 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Kami melihat bahwa jumlah cadangan devisa ini jauh lebih mencukupi tidak hanya untuk membayar impor, membayar utang, tapi juga untuk upaya-upaya dalam stabilitas nilai tukar Rupiah. Di sektor keuangan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga *Capital Adequacy Ratio* cukup tinggi 23,3% dan alat-alat likuiditas perbankan juga terjaga sebagaimana data alat likuid di bagi dana pihak ketiga yang sekitar 20% itu mencukupi.

Kemudian pertumbuhan kredit akhir tahun lalu sekitar 12,1% dan dana pihak ketiga 7,2%. Pembiayaan perusahaan tidak hanya dari kredit akan tetapi juga dari pasar modal baik penerbitan saham, obligasi, korporasi, medium Maupun sekuritas yang lain. Tahun lalu pembiayaan ekonomi atau korporasi dari pasar keuangan itu 210,1 triliun sedikit lebih rendah dari tahun 2017 sebesar 310,1 triliun tapi ini jumlah yang cukup besar. Sehingga memang pola pembiayaan korporasi yang dulu-dulunya lebih banyak dari hutang luar negeri 2 tahun terakhir ini lebih banyak dari dalam negeri, yaitu baik dari kredit perbankan maupun dari pasar modal.

Resiko kredit dikelola dengan baik *nonperforming loan* atau kredit macet

secara gross itu 2,67% secara net itu 1,18% untuk November 2018. Sehingga secara keseluruhan Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati, secara keseluruhan summary dari *outlook* perekonomian Indonesia dari Bank Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi perkiraannya 5 sampai 5,4% atau titik tengahnya 5,2%. Inflasi terjaga perkiraan kami 3,5% atau di titik tengah kisaran sasaran 3,5 +/- 1%. *Current account* defisit yang tahun lalu sekitar 3% PDB kami upayakan untuk bergerak di sekitar 2,5% PDB. Pertumbuhan kredit yang akhir tahun lalu sekitar 12% tahun ini 10 sampai 12% dan dana pihak ketiga 8 sampai 10%.

Dari pelajaran tahun 2019 untuk kedepannya tiga pelajaran penting harus kita cermati. Satu, stabilitas dan ketahanan perekonomian terus perlu kita jaga karena memang ketidakpastian global masih berlanjut meskipun intensitasnya tidak seburuk tahun lalu. Yang kedua, tentu saja daya saing dan produktifitas perlu terus kita dorong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan juga mengendalikan *current account* defisit. Dan ketiga adalah sinergi kebijakan antara otoritas yang berlangsung sangat erat terus baru kita perkuat ke depan.

Dari sisi Bank Indonesia arah kebijakan kami, kebijakan moneter memang kami akan tetap arahkan untuk pro stabilitas untuk menjaga stabilitas karena memang kondisi globalnya yang perlu kita harus cermati tapi instrument-instrumen kebijakan lain kami akan arahkan untuk pro pertumbuhan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, baik melalui relaksasi kebijakan makro prudential, kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan maupun ekonomi keuangan Syariah.

Secara selintas beberapa kebijakan yang akan kami tempuh di kebijakan moneter untuk memperkuat stabilitas, mengendalikan inflasi memang selain kebijakan moneter yang preventif dan Masih akan kami pertahankan, meskipun tingkat suku bunga kami BI *seven day reverse rewarred* kami pada saat ini sudah hampir mencapai puncaknya. Untuk stabilisasi nilai tukar kami terus akan melakukan upaya-upaya stabilisasi termasuk apabila diperlukan untuk intervensi di pasar valas dengan menjaga kecukupan cadangan devisa maupun likuiditas pasar.

Untuk mendorong pembiayaan ekonomi di kebijakan makro prudential, kalau tahun lalu kami relaksasi kebijakan uang muka untuk sektor perumahan kami akan melihat, men-*study* kebijakan-kebijakan yang lain di makro prudential untuk mendorong kredit ke sektor prioritas termasuk ekspor dan pariwisata maupun untuk pengembangan UMKM di samping menempuh kebijakan likuiditas yang memang akomodatif.

Di sistem pembayaran program-program kami untuk pengembangan uang elektronik, teknologi financial akan terus didorong termasuk juga perluasan program elektronifikasi untuk penyaluran bantuan sosial secara non tunai oleh Pemerintah, pembayaran berbagai moda transportasi maupun juga elektronifikasi di sejumlah provinsi untuk operasi keuangan Pemerintah.

Untuk pendalaman pasar keuangan tahun lalu kami sudah kembangkan di pasar valas tidak hanya instrument swap, akan tetapi *domestic nondelivery forward* yang sekarang malah sudah menjadi *reference* untuk *nondelivery forward* di *off-shore*. Sekarang kami akan mengembangkan instrument di pasar uang termasuk juga

pengembangan instrument repo dan *interest rate swap*.

Di samping koordinasi dengan Pemerintah untuk berpartisipasi di dalam pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur ke depan. Untuk ekonomi keuangan Syariah kami terus akan bekerja sama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah, baik untuk pengembangan ekonomi Syariah melalui perluasan program pemberdayaan usaha pesantren, pengembangan eco system halal khususnya makanan, fasion, pariwisata, juga pendalaman pasar keuangan Syariah. Kami sudah menerbitkan sukuk Bank Indonesia mulai akhir tahun lalu sebagai instrument moneter Syariah, manajemen likuidasi perbankan maupun pendalaman pasar keuangan. Kami juga akan terus melakukan edukasi kampanye halal life style melalui festival ekonomi Syariah di 3 wilayah maupun Indonesia Economy Syariah Festival secara internal.

Pengembangan UKM kami terus akan lakukan baik berbagai cluster pangan untuk pengendalian inflasi juga UMKM untuk kerajinan di berbagai daerah, juga keikutsertaan UMKM di berbagai pameran baik secara nasional maupun internasional.

Di kebijakan internasional kami juga akan memperluas penggunaan mata uang lokal yang sekarang sudah berlangsung dengan Malaysia dan Thailand kami akan perluas ke sejumlah negara lain. Di samping juga mendorong program-program untuk investasi dan pariwisata melalui kerja sama dengan Pemerintah untuk promosi perdagangan dan investasi pariwisata di luar negeri.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Sinergi dengan kebijakan secara nasional, baik dengan Pemerintah, OJK maupun berbagai otoritas yang telah berjalan erat kami akan terus perkuat baik melalui pengendalian inflasi mengenai TPI, TPID, stabilitas sistem keuangan melalui KSSK maupun juga high level meeting antar kami dengan OJK, dengan LPS, kemudian juga dengan Pemerintah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dalam mendorong infrastruktur pariwisata maupun yang lain-lain. Kemudian juga pembiayaan ekonomi melalui pasar keuangan maupun dalam konteks ekonomi keuangan digital.

Demikian Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI, kami melihat bahwa ekonomi Indonesia *insya allah* tahun ini akan lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas yang terjaga dan sinergi yang akan terus kami perkuat antara Bank Indonesia, Pemerintah, OJK, LPS, maupun juga dengan dunia usaha dan perbankan.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kami silakan Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (Prof. Dr. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua, serta Ibu dan Bapak Anggota Komisi XI DPR RI, Ibu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Kepala BPS.

Pertama-tama kami ucapkan tentunya selamat tahun baru 2019 dan ini adalah tahun yang sangat penting, karena ini adalah tahun terakhir dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019, sekaligus persiapan kami untuk memfinalisasi RPJMN 2020-2024.

Sesuai dengan tugas kami sebagai institusi perencana, kami akan lebih fokus bagaimana upaya untuk mencapai target-target pembangunan yang terutama pertumbuhan ekonomi sudah disampaikan tadi oleh Ibu Menteri Keuangan maupun Gubernur BI. Dan nanti akan kami tambahkan dengan target lain terkait pengangguran, kemiskinan, ketimpangan maupun kualitas sumber daya manusia.

Kalau kami melihat sejarah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebenarnya ada satu pola yang mungkin harus kita waspadai, yaitu terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan ekonomi dari periode pertama 1968-1979 yang kita katakan sebagai periode oil boom, Indonesia pernah mengalami periode tersebut. Rata-rata pertumbuhannya cukup tinggi 7,5% pada periode yang begitu panjang.

Kemudian pada periode di mana ekonomi kita didorong oleh pertumbuhan manufaktur rata-rata pertumbuhan masih cukup tinggi tapi menurun menjadi 6,4% periode 1980 sampai dengan menjelang krisis. Kemudian kita mengalami krisis keuangan Asia yang dimana pertumbuhan kita mencapai -13 sampai -14% dan kemudian perekonomian kita diwarnai dengan *comodity booming* sampai sekarang kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan 2000-2017 turun lagi ke 5,3%. Jadi artinya, kita harus mewaspadai tren penurunan ini dan berarti salah satu kesimpulan awal adalah perlu ada reformasi structural dalam perekonomian Indonesia kalau kita tidak ingin pertumbuhan itu akan melambat terus. Dan tren pertumbuhan melambat terus kalau Bapak dan Ibu perhatikan negara-negara di dunia, negara-negara maju yang sekarang pertumbuhannya seperti di Eropa yang sudah mendekati nol, demikian juga Jepang atau Korea yang tinggal 2-3% itu adalah akibat dari penurunan tren tersebut dan memang sudah terjadi *maturity* di negara-negara tersebut.

Kami kemudian mencoba melakukan analisa mengenai potensial growth dari Indonesia dan perkiraan kami untuk periode 2017 sampai tahun ini tahun 2019 paling tinggi ekonomi kita bisa tumbuh sampai 5,3%. Nah, pertanyaannya kenapa dalam periode tersebut perekonomian kita belum mencapai 5,3%. Ada beberapa hal yang pertama adalah net ekspor kita masih rendah terlihat juga pada neraca perdagangan 2018. Dan walaupun ada ekspor itu didominasi oleh produk ekspor yang sifatnya komoditas, impor migasnya masih tinggi, dan kemudian juga ada impor bahan baku penunjang industry yang orientasinya, *output*-nya itu pasar domestik. Ini adalah

kombinasi yang membuat pertumbuhan dari sisi ekspor menjadi relative kecil. Meskipun kita bisa menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga 5% atau lebih sedikit dari 5%, namun ini belum diimbangi dengan pertumbuhan investasinya. Investasi dengan tadi ada perkiraan dari BI sekitar 6-7% ini belum cukup untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih tinggi.

Karenanya di halaman berikut, kami coba melakukan diagnose apa yang kira-kira membuat pertumbuhan ekonomi kita stagnan. Secara garis besar kesimpulannya adalah di dalam ekonomi kita masih sangat kurang investasi yang produktifitasnya tinggi dan inovasi relative masih sangat minim. Akibatnya walaupun ada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kita ada pertumbuhan dengan produktifitas yang terbatas. Apa ciri dari pertumbuhan yang produktifitas terbatas, yaitu terkait pada sektor pertanian dan jasa yang kebetulan produktifitasnya rendah, sektor manufaktur kita tumbuh kurang cepat. Dan satu lagi meskipun ada pertumbuhan di sektor manufaktur kita tetapi manufaktur kita masih didominasi oleh produk manufaktur yang nilai tambahnya rendah atau yang relative sederhana. Karenanya faktor inovasi dan investasi menjadi penting, karena hanya itulah kita bisa meningkatkan produktifitas.

Kemudian rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum adalah seperti yang tadi disimpulkan dari diagnose perlunya peningkatan investasi produktif dan inovasi yang berujung pada peningkatan produktifitas dan barulah kita baru bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi paling tidak lebih daripada tingkat pertumbuhan potensial yang sudah disampaikan di awal. Dan memang kalau bicara peningkatan investasi produktif banyak sekali aspek, baik itu regulasi, institusi, dukungan dari fiskal, infrastruktur, sumberdaya manusia, sektor keuangan maupun dari kemampuan untuk menciptakan pasar ekspor baru.

Nah, dengan dasar diagnose pertumbuhan dan analisa potensi pertumbuhan. Kita loncat sedikit, untuk RPJMN tahun 2020-2024 yang saat ini sedang diselesaikan untuk kerangka tehnokratisnya. Jadi kerangka yang baru disiapkan dari sisi tehnokratis di pimpin oleh Bappenas dengan melibatkan KL lain. Yang harus kita perhatikan adalah yang namanya reformasi structural itu harus dilakukan atau harus ada sesuatu yang dilakukan tahun 2020-2024. Kalau tidak ada reformasi structural sama sekali, maka potensial growth kita cenderung malah turun di bawah 5% menuju 4,9%. Karenanya di dalam RPJMN itu kita menekankan perlunya reformasi structural...

KETUA RAPAT:

Bapak Menteri, bisa dijelaskan reformasi structural itu apa?

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Reformasi structural pada intinya salah satunya yang paling *clear* meninggalkan ketergantungan kita pada sumberdaya alam, sehingga ekspor lebih didominasi nantinya oleh ekspor produk olahan yang punya tambah tinggi. Jadi memang manufaktur akan menjadi kunci dari pertumbuhan 5 tahun ke depan. Kami

coba buat 3 skenario, rata-rata pertumbuhan 2020-2024. Skenario rendah rata-rata pertumbuhan per tahunnya 4,5% dan sedang 5,7% dan tinggi 6%. Nah, nanti setelah bulan April, maka dengan pemenang kita akan tentukan mana skenario pertumbuhan yang diambil apakah yang rendah, apakah yang sedang, dan tinggi dan tentunya harus diantisipasi bagaimana cara mencapai pertumbuhan tersebut.

Tapi ada prasyarat untuk mencapai skenario pertumbuhan tersebut, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja 68 atau 70% tergantung skenarionya. Pertumbuhan investasi ini yang paling penting, tadi sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Ketua, salah satunya pertumbuhan investasi harus di atas 7% bahkan kalau bisa 8%, karena itu adalah kunci yang bisa membuat ekonomi kita menjadi lebih produktif. Kemudian pertumbuhan total faktor produktifitas itu 10% paling rendah, tapi tentunya diharapkan jauh lebih tinggi dari itu dengan rata-rata lama sekolah tetap bisa dipertahankan di 10 tahun atau lebih baik kalau lebih. Itu adalah gambaran mengenai pola pertumbuhan ekonomi kita.

Kalau kita lihat *outlook* 2019 kami masih berpegang kepada yang disepakati antara Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah pada waktu pembahasan APBN 2019, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3% ratio gini 0,38 sampai 0,385 pengangguran terbuka 4,8 sampai dengan 5,2 dan tingkat kemiskinan 8,5 sampai 9,5 dan IPM 71,98. Nah, sekarang kita coba bicara bagaimana mencapai target-target yang baru kami sampaikan. Untuk pertumbuhan ekonomi kita bisa fokus pada 3 hal, yaitu untuk mendorong pertumbuhan investasi berarti harus melanjutkan perbaikan iklim investasi, baik dari sisi regulasinya, perpajakannya maupun pasar keuangannya.

Kemudian untuk daya saing ekspor yang kedua, memperkuat daya saing ekspor berarti yang paling penting ada selain infrastruktur untuk peningkatan konektifitas perlu ada kreasi, baik tujuan maupun produk ekspor yang relative baru. Kemudian untuk peningkatan nilai tambah sektor industry pengolahan non migas, berarti disini perlu ada pertama koordinasi kebijakan, perdagangan dan industry, kemudian supply dari listrik dan juga koneksi dari internet serta transformasi dalam Pendidikan vokasi. Jadi 3 strategi secara umum itulah yang kita harapkan bisa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Tadi sudah disampaikan oleh baik Ibu Menteri Keuangan maupun Gubernur BI mengenai pentingnya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas makro ekonomi di tengah tekanan eksternal dan pada saat yang sama mendorong pertumbuhan yang inclusive dan berkelanjutan. Itu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

Kami langsung ke kemiskinan di halaman 15. Kemarin oleh Kepala BPS baru diumumkan bahwa tingkat kemiskinan berdasarkan Susnas bulan September 2018 itu adalah 9,66% artinya masih ada sekitar 25,7 juta jiwa warga Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Nah, kemudian tingkat penurunan tersebut kalau kita lihat year on year September 2017, 2018 tingkat kemiskinan turun sekitar 0,46% atau setara 910 ribu jiwa. Dan tentunya keberhasilan untuk terus mengurangi tingkat kemiskinan ini salah satunya adalah karena perbaikan dari efektifitas program penanggulangan kemiskinan dan juga pembangunan yang relative semakin merata.

Kalau kita bandingkan desa dengan kota memang masih terlihat tingkat

kemiskinan desa itu masih relative tinggi masih di atas 13%, terakhir 13,10% sedangkan yang di kota itu sudah di bawah 7% tepatnya 6,89%. Jadi memang yang masih harus diperbaiki secara menyeluruh adalah upaya untuk memperbaiki kemiskinan di desa dengan pendekatan tepat sasaran.

Selain penduduk miskin tentunya kita juga harus memperhatikan katagori penduduk yang rentan miskin. Ini adalah katagori penduduk yang baru lepas dari garis kemiskinan tetapi pola konsumsinya atau pengeluarannya belum terlalu jauh dari batas kemiskinan itu sendiri, tepatnya yang kuning itu adalah pada teritori antara garis kemiskinan sampai 1,5 kali garis kemiskinan.

Nah, kalau kita lihat di tahun 2015 tingkat rentan miskinnya yang warna kuning 24,3% dari jumlah penduduk terus menurun sampai kemarin yang diumumkan oleh Bapak Kepala BPS, kerentanan kemiskinan diperkirakan pada 20,19%. Jadi kalau kita lihat terjadi penurunan juga pada kelompok miskin, rentan miskin, yang pada tahun 2015 kedua-duanya total itu mencapai 35% dan pada tahun 2018 sudah berada di 30%. Ini suatu capaian juga yang sangat baik, karena artinya kita makin mengurangi kelompok yang rentan miskin di luar yang miskin dan miskin yang kronis atau sangat miskin.

Tentunya kita harus mewaspadai karena penduduk rentan miskin ini secara absolut jumlahnya masih besar, yaitu 53 juta jiwa karena ini setara dengan 20,2% total penduduk. Karenanya harus ada kebijakan khusus pada mereka agar mereka terus naik kelas, artinya naik kelas pendapatannya dan tidak jatuh kembali di bawah garis kemiskinan.

Satu pencapaian lagi yang penting adalah tingkat kemiskinan kronis atau tingkat sangat miskin yang terus menurun, meskipun penurunannya semakin melambat karena memang sangat sulit untuk menjangkau kelompok yang miskin kronis ini. 2015 masih 4,17% tahun 2017 masih 3,77% dan 2018 ini turun lagi menjadi 3,57%. Kalau disetarakan itu adalah 9,4 juta jiwa, jadi masih ada 9,4 juta jiwa penduduk Indonesia yang masih katagori miskin kronis atau sangat miskin dan ini setara kira-kira 2 juta rumah tangga pada bulan Maret 2018.

Nah, kalau kita lihat secara mendalam siapa atau siapa saja yang masuk katagori yang rentan. Jadi profil penduduk rentan yang hidupnya atau pengeluarannya antara garis kemiskinan sampai 1,5 garis kemiskinan. Pertama, memang kebanyakan kepala rumah tangga yang kelompok ini adalah lulusan SD, paling besar adalah lulusan SD, kemudian yang tidak lulus SD, itu yang paling besar.

Kemudian yang kedua, 21% dari mereka adalah Lansia jadi memang rumah tangga yang kelompok orang tua atau lanjut usia. Yang ketiga, ini mohon maaf untuk Bapak Ketua dan Bapak Johnny Plate, provinsi dengan tingkat kerentanan tertinggi adalah NTT 27,4% disusul Aceh 26%, dan Lampung 26% jadi ini tidak melulu masalah timur barat tapi masalah spesifik kepada provinsinya.

Kemudian ciri khas lainnya adalah 43% rumah tangga yang tidak memiliki sanitasi layak dan 37% tidak memiliki akses untuk air minum layak. Jadi rumah tangga masih susah akses sanitasi dan air bersihnya ini yang berpotensi masih kelompok rentan. Kelompok rentan ini mayoritas dipedesaan 54% tapi masih ada 46% yang tinggal di perkotaan.

Nah, kemudian kami masuk kepada ketimpangan yang baru diumumkan oleh Pak Kepala BPS juga kemarin. Tingkat ketimpangan kita menurun dari 0,389 menjadi 0,384 dan tentunya kalau kita lihat desa, kotanya itu malah terbalik, desa yang tingkat ketimpangannya relative rendah turun menjadi 0,319 diperkotaan juga turun lebih tajam sebenarnya dari 0,401 menjadi 0,391. *Outlook* kita untuk tingkat ketimpangan di 2019 mudah-mudahan sudah diantara 0,38 sampai 0,385.

Kemudian lanjut, khusus untuk strategi mengenai pengurangan kemiskinan itu sudah ada di dalam APBN 2019 berdasarkan turunan dari RKP. Ada penguatan untuk PKH, kemudian Rastra itu akan berubah total menjadi Bantuan Pangan Non Tunai untuk 15,6 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian ada bantuan Pendidikan, Kartu Indonesia Pintar bagi 20 juta anak usia sekolah. Dan kemudian ada Kartu Indonesia Sehat yang diperluas menjadi 96,8 juta jiwa penerima atau PBI (Penerima Bantuan Iuran). Dan ada upaya untuk melakukan perbaikan ketimpangan dalam pengelolaan lahan, di mana akan ada pelepasan tanah objek reforma agraria 57 ribu hektar dan pengelolaan hutan kemasyarakatan 300 ribu hektar.

Yang lainnya terkait dengan kesehatan fokus kepada stunting penurunan stunting. Kemudian untuk perumahan kita fokus kepada akses air bersih dan sanitasi, serta terus menyediakan kualitas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk Pendidikan yang berkualitas kita fokus tidak hanya kepada peningkatan pendidikannya akan tetapi juga angka partisipasi kasar di daerah yang terluar, yang tertinggal serta peningkatan tata kelola yang dasar, paling tidak percepatan kepemilikan sinkronisasi dari dokumen kependudukan, baik akta kelahiran maupun nomor induk kelahiran.

Nah, ini adalah program-program yang ada saat ini baik untuk kelompok masyarakat miskin maupun yang rentan. Yang horizontal yang bawah dari 0 sampai 100 itu menunjukkan kelompok pendapatan masyarakat dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, sehingga dana desa memang mencakup untuk semuanya, karena dana desa tidak diperuntukan untuk masyarakat tertentu kecuali untuk desa. Dan kemudian ada KUR, ada pelatihan UMKM, pelatihan kerja, ada KUBE, yang ditujukan lebih sampai ke 70% atau 80% masyarakat dari penghasilan terendah sampai yang 80% yang tertinggi.

Kemudian tentunya air minum, sanitasi, rumah tinggal layak huni untuk kelompok yang lebih dekat kepada yang rentan miskin dan termasuk tentunya kelompok miskin. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mencakup juga pekerja informal, selain pekerja formal. Dan satu lagi adalah kesehatan Kartu Indonesia Sehat yang sudah mencakup 36% dari kelompok masyarakat dengan penghasilan terendah, 36% yang terendah maksudnya.

Kemudian subsidi energi ditargetkan untuk yang 40% terendah. Kemudian Kartu Indonesia Pintar 15% yang terendah. Ada bidik misi ini untuk universitas, ada Bansos Pangan yang BNT tadi 25%, maupun PKH untuk yang 15% kelompok *income* yang terendah. Jadi ini adalah bagaimana strategi kita dari yang upaya untuk mendorong ekonomi produktif, pemenuhan pelayanan dasar, menyediakan jaminan sosial, sampai kepada bantuan sosial.

Kalau Bapak dan Ibu perhatian, bantuan sosial fokus kepada kelompok yang

memang *income* karena merekalah yang memerlukan Bansos. Yang lainnya tentunya sesuai dengan tingkat-tingkatnya mendapatkan jaminan sosial, tambahan jaminan sosial, pemenuhan pelayanan dasar dan usaha ekonomi produktif.

Lanjut, ini hanya garis besar dari beberapa program KUR, yang paling penting misalkan 61,3% dan KUR 2018 didominasi oleh KUR mikro, jadi KUR yang paling kecil itu hampir mencapai hampir 74 triliun. Dan 46,8% penyaluran untuk sektor produksi, jadi bukan sektor perdagangan, baik itu pertanian, perikanan, industry, konstruksi, maupun jasa.

Dan juga bisa dilihat persebarannya per wilayah atau per pulau, di mana pulau Jawa masih yang paling besar 66 triliun peredaran KUR-nya, separuh lebih 55% dan kemudian Sumatera nomor dua terbesar, disusul Sulawesi dan wilayah lainnya tentunya yang masih relative kecil adalah Maluku dan Papua yang masih 1,8%.

Lanjut, ini kredit ultra mikro yang salah satunya digagas oleh Kementerian Keuangan, dimana kredit ini bersifat melengkapi program lain termasuk KUR, karena KUR kita lihat masih kurang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Kemudian belum ada plafon pinjaman yang di bawah 10 juta serta ada sekitar 59 juta pelaku UMKM yang butuh biayanya sebenarnya Cuma 5 sampai 10 juta. Jadi memang ada target market yang harus dibantu. Dan kita juga ingin memperbaiki kalau ada KUR yang tidak tepat sasaran. Satu hal yang penting adalah ada pendampingan pada nasabah tidak hanya untuk mencegah kredit macet akan tetapi juga pengembangan usahanya.

Lanjut, ini dampak kredit ultra mikro yang bisa kami sampaikan. Salah satunya bisa meningkatkan omset, provit, maupun memperbaiki pola pengeluaran misalnya pola pengeluaran pakaian untuk nasabahnya juga meningkat, artinya *income*-nya membaik.

Lanjut, secara umum kita akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan kelompok menengah ke bawah, baik melalui kemudahan perizinan, memperkuat UMKM, memperluas manfaat dana desa, pengembangan pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa, termasuk infrastruktur konektivitasnya, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Lanjut, untuk pengangguran kami sampaikan data terakhir dari Satkernas pengangguran kita adalah 5,34% kira-kira setara 7 juta lapangan kerja. Dan 2019 kita harapkan bisa turun pada rentan 4,8 sampai 5,2%. Nah, kalau kita lihat target di RKP tersebut, maka kita perlu menciptakan kesempatan kerja tahun ini 2,6 sampai 2,9 juta orang untuk bisa terus menurunkan tingkat pengangguran, karena kita harus berhadapan dengan baik angkatan kerja yang baru masuk, berhadapan dengan angkatan kerja yang belum bekerja. Itulah kita harus tetap menciptakan lapangan kerja, dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi itu kemudian berujung kepada penciptaan lapangan kerja. Nah, teruma kita harus fokuskan pada yang berpendidikan SMA keatas di sektor yang memberikan nilai tambah tinggi, termasuk industry dan jasa modern.

Lanjut, menurut perkiraan kita elatisitas kesempatan kerja itu diperkirakan 500 sampai dengan 520 ribu penciptaan lapangan kerja per 1% pertumbuhan ekonomi, karena kita butuh tadi sampai 2,5 juta lapangan kerja baru. Nah, salah satu yang kita

harapkan adalah sektor pariwisata yang kita harapkan bisa kontribusi sampai 10% dari total tenaga kerja yang nantinya yang bisa diserap. Satu hal lagi, program Pemerintah maupun transfer ke daerah dan dana desa kita harapkan bisa menyumbang sampai 435 ribu lapangan pekerjaan. Termasuk untuk pekerjaan infrastruktur yang bersifat padat karya.

Lanjut, ini perkiraannya untuk 2019 kita harapkan pertanian berkontribusi dengan angka-angka tadi. Kemudian kita harapkan penciptaan lapangan kerja sektoral otomatis akan tergantung kepada sektor manufaktur dan jasa. Pertanian akan mengalami penurunan karena sebagian yang bekerja di pertanian akan pindah ke industry maupun jasa diakibatkan oleh tentunya tingkat upah yang lebih rendah di pertanian dibandingkan sektor industry dan jasa. Kembali sektor jasa yang kita bicarakan disini, pariwisata, logistik dan konstruksi. Jadi itu beberapa sektor yang kita harapkan bisa membantu untuk penciptaan lapangan kerja.

Lanjut, ini beberapa langkah strategis untuk peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja, yaitu pertama kita harapkan proporsi tenaga kerja perkalian menengah bisa mencapai 37%. Data terakhir baru 31%, jadi masih perlu efek lebih untuk tenaga kerja perkalian menengah.

Pendidikan pada vokasi harus bisa mencapai 1,4 juta orang, sertifikasi kompetensi bisa mencapai 1 juta orang dan kita harapkan bisa menciptakan wirausaha baru sampai 272 ribu orang dan ini tentunya harus melibatkan koordinasi antara kementerian dan lembaga.

Lanjut, satu hal lagi bahwa kita harapkan ada penciptaan lapangan kerja kira-kira 2 juta untuk pembangunan infrastruktur skala menengah kecil yang bersifat padat karya, baik yang KL, DAK, maupun dana desa. Kemudian melalui pembangunan konstruksi atau infrastruktur yang dari konstruksi kita harapkan ada penciptaan lapangan kerja 925 ribu orang. Itu yang ada di kawasan industry KEK maupun kawasan wisata prioritas.

Nah, kita tunjang nanti penyerapan itu dengan pelatihan sampai 1,4 juta yang berbasis kompetensi. Dan kita harapkan akan makin banyak tenaga kerja tersertifikasi, baik di kontruksi, pariwisata, perhubungan maupun di bidang penunjang infrastruktur lainnya.

Satu lagi mungkin yang kami lewat adalah indeks pengelolaan manusia yang ditargetkan 71,98. Dan kalau kita lihat angka harapan hidup tahun 2019 diharapkan meningkat dari 71,2 tahun menjadi 71,3 tahun. Rata-rata lama sekolah menjadi 8,3 tahun, lama sekolahnya menjadi 13,21 tahun. Pengelolaan perkapiat disesuaikan itu 11,13 juta per tahun. Sehingga kita harapkan IPM kita naik dari tahun 2018, perkiraan kita tahun 2018 adalah 71,38 menjadi 2019 sebesar 71,98.

Demikian Bapak Pimpinan yang bisa kami sampaikan terkait *outlook* dari pertumbuhan ekonomi dan target pembangunan tahun 2019.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sebelum ke Bapak BPS, tadi yang masalah MPT itu saya mau tanya memangnya di Papua lebih tidak rentan daripada di NTT. Jadi tolong dijelaskan ke Bapak BPS ini jangan sampai tidak pernah disurvei dibidang tempat sana lebih rentan, tempat sini tidak rentan. Saya tidak percaya orang Papua di gunung itu lebih makmur daripada orang NTT. Itu membuat saya sangat lucu, yang satu.

Yang kedua, program apa yang Bapak buat sudah tahu kita tahu ini ada rentan apa yang dibuat supaya dia tidak rentan lagi. Jadi nyambung itu antara yang kira ngomong sama programnya nyambung, disitu kelihatan Pemerintah bekerja atau tidak. Kalau tidak inikan kita kayak dengar kuliah dari seorang professor Cuma dengar tapi kita tidak buat apa-apa. Dan kita duduk disini ini kita mau menyelesaikan bangsa, menyelesaikan tadi IPM, menyelesaikan segala macam. Jadi tolong dijelaskan apa Papua lebih tidak rentan daripada NTT.

Silakan Pak.

KEPALA BPS (Dr. SUHARIYANTO):

Terima kasih Bapak.

Sebetulnya kalau BPS mengeluarkan angka rilis kemiskinan, itu yang dikeluarkan BPS hanyalah angka miskin dan tidak miskin. Tetapi untuk membuat sebuah kebijakan memang di Bappenas ataupun di negara lain perlu dibuat lapisan-lapisannya, karena ketika kita bicara lapisan masyarakat misalnya *policy* untuk chronic partnerty itu akan berbeda dengan yang rentan miskin.

Nah, untuk yang di Papua kemiskinan memang jauh lebih tinggi dibandingkan di NTT. Di Papua itu pada bulan September 2018 adalah sebesar 27,43. Di NTT adalah 21,03 dengan catatan progress di NTT memang lebih cepat Bapak. Tetapi ketika kita bicara rentah ditarik keatas di Papua itu jatuhnya kepada yang miskin bukan rentan miskin.

Itu mungkin yang bisa saya jelaskan Bapak, atau mungkin Bapak Menteri Bappenas ada *policy* yang saya tidak tahu mungkin bisa membantu itu Bapak.

KETUA RAPAT:

Tidak, nanti Bapak punya jelasin dulu soal nanti Bapak punya presentasi. Nanti dijawab setelah masuk pertanyaan.

Silakan Bapak.

KEPALA BPS:

Terima kasih Bapak.

Yang terhormat Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI, Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Bapak Menteri Bappenas beserta seluruh jajaran.

Pertama, tentu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru dengan harapan

tahun baru ini akan membawa kebaikan untuk kita semua. Jadi dalam kesempatan ini saya akan meng-*highlight* beberapa capaian tahun 2018, tetapi yang paling penting saya akan meng-*highlight* PR-PR yang tertinggal dengan harapan akan ada perbaikan di tahun 2019.

Yang pertama, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Menkeu dan Gubernur BI, bahwa prediksi dari berbagai lembaga internasional terhadap perekonomian global di tahun 2019 tidak begitu cerah. Yang tadinya 3% dikoreksi ke 2,9%. Catatan yang perlu kita perhatikan adalah pergerakan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Amerika dan Cina, karena ekspor kita ke Cina itu adalah sebesar 15% sementara ekspor kita ke Amerika itu adalah 11%. Jadi perlambatan ekonomi yang akan terjadi di Tiongkok dan di USA akan berpengaruh karena ekspor kita kedua negara ini adalah sebesar 26%.

Yang kedua, berdasarkan prediksi harga komoditas ada 4 komoditas yang perlu mendapat perhatian utama, karena total ekspor dari 4 komoditas ini menyumbang hampir 40% kepada total ekspor kita. Misalnya minyak mentah pada tahun 2019 diprediksi akan turun pada tahun 2018 ini ekspor minyak kita menyumbang sebesar 9,3% kepada total ekspor. Kemudian yang kedua adalah batubara, ekspor terbesar kita menyumbang 15,12% itu adalah berasal dari bahan bakar mineral dimana batubara ada di dalamnya. Ketiga ada kelapa sawit, kelapa sawit ini menempati posisi kedua ekspor kita terbesar dan menyumbang 12,5% kepada total ekspor Indonesia pada tahun 2018. Keempat adalah karet, karet ini menyumbang 3,92% kepada total ekspor. Hal yang harus diwaspadai lagi karena karet di Indonesia lebih banyak diupayakan atau diusahakan oleh rumah tangga perkebunan rakyat bukan oleh perusahaan. Sehingga apa yang terjadi kepada pergerakan harga karet akan berpengaruh besar kepada kesejahteraan petani karet.

Merilis pertumbuhan ekonomi yang terakhir adalah pada posisi triwulan ketiga tahun 2018. Saat ini BPS sedang menyelesaikan pertumbuhan ekonomi untuk *full years* tahun 2018 yang nanti akan kita rilis pada tanggal 6 Februari. Dari sisi lapangan usaha 64,76% dari pergerakan ekonomi Indonesia ditentukan oleh 5 sektor. Pada posisi yang sangat ideal harusnya pertumbuhan di 5 sektor ini tumbuh bagus, sehingga pertumbuhan ekonominya akan berkualitas dan mempunyai dampak yang besar kepada masyarakat dilapisan bawah.

Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan ketiga. Pertumbuhan sektor yang berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional itu hanya konstruksi, yang pertama. Yang kedua adalah perdagangan 5,14%. Untuk industry dan pertanian kita masih punya PR besar, karena itu saya akan meng-*highlight* untuk industry pertanian. Untuk industry pengolahan pertumbuhan pada tahun 2018 ini masih stagnan di 4,24%. Kalau kita lihat capaian yang bagus pada tahun 2018 itu adalah adanya peningkatan permintaan domestic dan luar negeri terhadap produk-produk bahan makanan, minuman dan juga produk-produk tekstil. Untuk dijadikan catatan, pada bulan Desember 2018 ini ekspor kita ke Amerika Serikat khusus untuk textile seperti pakaian jadi bukan rajutan, barang-barang rajutan dan alas kaki itu hampir mencapai 500 juta sendiri.

Neraca perdagangan kita dengan Amerika Serikat pada tahun 2018 ini adalah sebesar 8,6 miliar dan sebagian diantaranya disumbang dari industry textile dan

pakaian jadi. Karena itu, industry makanan, minuman dan produk-produk textile yang kontribusinya besar kepada industry pengolahan perlu mendapat perhatian.

Saat ini Pemerintah sedang menggulirkan *making Indonesia 4.0* dan kalau kita lihat Pemerintah akan berkonsentrasi kelima sub sektor manufacture. Kalau kita lihat pergerakan disana 5 sub sektor itu adalah makanan dan minuman, textile dan pakaian, otomatis kimia dan elektronik dan pada tahun 2018 ini pergerakan atau pertumbuhan industry makanan dan minuman sudah bagus di 9,74%. Industri textile sudah bagus, PR kita adalah pada pertumbuhan industry kimia dan industry barang logam yang tumbuhnya adalah negative. Salah satu penyebabnya karena input barang produksinya sedemikian besar masih berasal dari impor, sehingga kedepan kita perlu melakukan khusus untuk kimia dan barang-barang logam.

Untuk pertanian, pertumbuhannya pada tahun 2018 ini hanya sebesar 3,91% dengan catatan yang tumbuh bagus adalah tanaman hortikultura. Kalau kita kaitkan dengan ekspor yang ada memang perlu dijadikan catatan bahwa ekspor hasil pertanian yang meningkat cukup besar dari tahun 2017 ke 2018 memang sebagian besar berasal dari produk hortikultura, yaitu tanaman obat aromatic dan rempah-rempah dan satu lagi adalah buah-buahan tahunan.

Salah satu tantangan terbesar di pertanian kita perlu memperhatikan *warning* dari BMKG bahwa pada bulan Januari sampai dengan April 2019 ini BMKG memprediksi bahwa intensitas curah hujan akan pada level menengah dan tinggi. Padahal pada tahun ini panen padi raya akan bergeser sekitar 2 minggu dan mencapai puncaknya pada bulan Maret 2019, sehingga kalau curahnya terlalu tinggi tentu akan berpengaruh kepada kualitas gabah yang akan dipanen raya pada akhir Maret 2019. Jadi itu perlu menjadi perhatian.

Yang kedua, berdasarkan ketetapan Menteri ATR telah terjadi penurunan luas lahan baku sawah dari 7,75 ke 7,11 juta hektar, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya supaya tidak terjadi konversi lahan-lahan pertanian karena itu akan mengancam ketahanan pangan kita. Itu dari sisi produksi, sementara dari sisi pengeluaran kalau kita lihat seluruh komponen pengeluaran tumbuh bagus dari konsumsi rumah tangga, dari PNTB, ekspor, konsumsi Pemerintah maupun lembaga non profit yang melayani rumah tangga.

Satu catatan yang perlu menjadi perhatian karena menjadi PR besar kita adalah mengenai ekspor dan impor kita yang pada tahun 2018 ini neraca perdagangannya mengalami defisit yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat perkembangan ekspor dan impor pada tahun 2018 ini sebetulnya ekspor kita masih tumbuh 6,65%. Pertumbuhan ini didorong baik dari ekspor migas maupun non migas, tetapi pertumbuhan impornya lebih tinggi, yaitu sebesar 20,15%. Dan kalau kita lihat disana impornya tumbuh baik untuk konsumsi bahan baku maupun barang modal, sehingga performa neraca perdagangan pada tahun 2018 ini memang perlu menjadi perhatian khusus karena kita mengalami defisit sebesar 8,57 miliar.

Dari sisi ekspor kita perlu memberikan perhatian kepada 10 HS 2 digit yang sumbangan kepada total ekspor adalah sebesar 58%. Jadi 58% ini ekspor kita ditentukan oleh ekspor dari 10 golongan barang HS 2 digit ini. Dari perkembangan tahun 2017 ke tahun 2018, yang perlu menjadi perhatian adalah di nomor dua, yaitu

lemak dan minyak hewan nabati. Disana CPO kita pada tahun 2018 ini memang mengalami penurunan impor dari 18 miliar menjadi 16 miliar. Kalau kita kaji lebih dalam penurunan ekspor CPO terjadi di India dan juga beberapa negara Eropa. Di India kita tahu ada penerapan bea masuk CPO tinggi, sementara di beberapa negara Eropa terjadi kampanye negative kepada CPO kita, itu yang menyebabkan ekspor kita lemak dan minyak hewan nabati pada tahun 2018 ini mengalami penurunan 11,3%.

Yang kedua adalah karet dan barang dari karet, disana yang berwarna merah itu juga mengalami penurunan sebesar 17,5% karena penurunan harga karet memang tajam. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ini perlu mendapat perhatian ekstra karena karet di Indonesia lebih banyak diupayakan oleh perkebunan rakyat. Dari sisi impor yang perlu kita waspadai ada impor kita pada tahun 2018 memang itu mengalami peningkatan yang cukup besar dan dari 10 golongan barang utama, peningkatan impor ini terjadi hampir di semua barang. Jadi kedepan memang kita masih mempunyai PR besar, bagaimana kita bisa menghasilkan berbagai barang impor bahan baku yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Dari perkembangan impor ini ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, adalah pengendalian konsumsi dan diversifikasi BBM. Kemudian implementasi dari B20 yang kemarin juga kita rapatkan di tempatnya Bapak Menko, kebijakan memang sudah digulirkan akan tetapi dilapangan nampaknya masih ada beberapa kendala dan kedepan itu menjadi PR yang perlu kita pecahkan bersama. Sementara untuk indikator-indikator sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan gini ratio tadi sudah disampaikan oleh Menteri Bappenas.

Untuk sementara demikian yang bisa saya sampaikan Bapak. Kalau nanti diperlukan data yang lebih detail akan kita berikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau begitu silakan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota yang ingin bertanya.

Bapak Misbakhun.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih Bapak Ketua.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,
Menteri Keuangan beserta jajaran yang saya hormati bersama Bapak Wamen,
Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran yang saya hormati,
Menteri PPN/Kepala Bappenas yang saya hormati,
Kepala BPS beserta jajarannya yang saya hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo budaya.

Saya juga kalau ingin menyampaikan juga selamat tahun baru kepada seluruh mitra kerja Komisi XI DPR RI, mudah-mudahan di tahun 2019 kita bisa lebih membangun kebersamaan untuk kebaikan bangsa dan negara. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada Ibu Menteri karena menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia. Mudah-mudahan citra ini juga memberikan dampak kepada Pemilu kita 2019, karena kalau Menteri Keuangannya terbaik di dunia mudah-mudahan ekonomi kita juga menjadi ekonomi yang diberikan apresiasi yang memadai.

Yang utama bagi saya ingin menyampaikan begini Ibu, citra ini penting tapi rasa itu lebih penting lagi. Bahwa citra yang kita bangun itu dirasakan oleh rakyat dalam sebuah rasa yang bisa diserap dalam kapasitas rakyat itu. Kami ini berupaya sebaik mungkin sebagai partai pendukung Pemerintah memberikan sebuah dukunagn politik yang memadai, karena ini adalah ruangan politik tadi Ibu cerita banyak sekali tentang APBN, tentang *outlook*, tentang apa yang dicapai, dan semuanya itu adalah *the story behind the number*. Apa yang dicapai dan dirasakan oleh rakyat itu yang paling utama, bagaimana kemudian dalam kesederhaan kepemimpinan Bapak Jokowi itu kemudian rakyat merasakan dari program-program yang dijalankan. Apakah semuanya kemudian *all will inform*, apa yang semua tersajikan dengan baik itu apakah rakya juga merasakannya.

Tadi secara kombinasi semua pemangku pengambil kebijakan yang sangat penting, baik di bidang fiskal, kemudian di bidang moneter, kemudian Bappenas mengenai perencanaan, dan bagaimana kemudian implementasi hasil-hasil pembangunan itu disampaikan dengan sangat bagus. Dan kemudian Kepala BPS memberikan ukuran-ukuran berdasarkan itu semuanya sangat menggembirakan. Tapi Bapak Jokowi itu kalau memberikan arahan selalu mengatakan frasa, bagaimana program itu menjadi rasa, tidak hanya menjadi sebuah kata, kata Bapak Jokowi. Saya sering ketemu sama Bapak Johnny Plate ini sama Bapak Jokowi.

Nah, yang ingin saya sampaikan karena apa? yang dirasakan oleh dunia usaha itu seperti apa dalam sisi perpajakan. Tadi di slide Ibu nomor 8 saya ingat sekali saya lihat. Tax ratio kita naik dari 10,7 menjadi 11,5 dan inikan memberikan jawaban terhadap apa yang selama ini disampaikan oleh orang mengenai tax ratio kita. Tapi jawaban yang ada disana ada realisasi sementara dan kita tahu bahwa semuanya masih bersifat sementara pada saat ini karena *measurement* masih sangat pendek terhadap penutupan buku kita.

Yang ingin saya sampaikan adalah hasil positif reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini, ini hasil reformasi perpajakan atau hasil dari tax amnesty, karena apa? ada *kick off* yang luar biasa di tahun itu adalah tax amnesty itu sendiri yang merupakan cita-cita besar Bapak Jokowi dan terealisasikan dengan sangat baik di tahun 2016 dan kemudian itu merasa terhenti reformasi perpajakan itu. Karena apa? Undang-Undangnya sampai sekarang tidak berjalan. Janji Presiden untuk

menurunkan tarif berlu berjalan dan ini buruh effort yang luar biasa. Presiden ingin memberikan tarif yang kompetitif, kalau kemudian ada masalah dengan DPR RI atau hubungan dengan DPR RI atau kemudian DPR RI ini bisa ada Pansus, bisa ada Panja, bisa Panja di Komisi XI DPR RI, Ada Pansus melibatkan semua Komisi, dan sebagainya. Inilah menurut saya bagaimana kemudian apa yang menjadi keinginan Presiden itu bisa dilaksanakan dengan baik.

Bagaimana mungkin kemudian ada kekuatan politik meng-*claime* bahwa Pemerintah tidak punya keinginan untuk menurunkan tarif. Padahal diusulan-usulan kebijakan Pemerintah penurunan tarif itu dijalankan. Karena apa? saya menyampaikan ini karena apa? *stake holder* utama ekonomi kita adalah pengusaha. Pengusaha menginginkan apa dan itu sudah disampaikan dan itu sudah menjadi sebagian dari komitmen politik yang disampaikan oleh Pemerintah. Bagaimana Bapak Ferry sebagai Gubernur BI memberikan respon yang sangat luar biasa, begitu LTV langsung relaksasi. Relaksasi di sektor perpajakan kemudian ada penurunan tarif UMKM. Bagaimana dengan kemudian secara kelembagaan pajak ini? ada permasalahan yang sangat structural yang harus kita selesaikan. Kenapa kita mengalami stagnasi terhadap pertumbuhan tax ratio kita pada saat yang sama kita menaikkan PDB kita. Setiap naik PDB pertumbuhan domestic bruto kita selalu kemudian pajak itu tidak identik naiknya. Ada masalah apa? ekonominya mengalami kenaikan pertumbuhan PDB tapi pajak. Apakah perlu ada kemudian cukup reformasi atau cukup kita kemudian melihat itu secara keseluruhan. Nah, sampai sekarang keinginan Presiden untuk menurunkan tarif dan sebagainya, perbaikan structural itu belum berjalan kalau menurut saya secara paralel dengan harapan yang diinginkan oleh Presiden.

Nah, mengimplementasikan ini kan kita ini 67% di dalam pendukung Presiden ini. Nah, inikan tinggal masalah bagaimana mengkomunikasikan secara politik. Saya terpaksa melakukan ini Ibu, karena ini adalah saya tidak ingin kemudian isu-isu perpajakan ini direbut oleh orang lain. Penurunan PTK, menaikkan jumlah PTKP sudah kita lakukan sejak tahun 2015-2016. Keinginan Pemerintah membentuk lembaga sendiri untuk pajak seperti janji kampanye Presiden dan ada di Nawacita sudah dilakukan dalam usulan KUP.

Keinginan Pemerintah untuk melakukan penurunan tarif itu sudah akan dilakukan kalau kemudian PPH itu masuk kepada DPR RI dan ini sejak awal ada. Saya ingin menyampaikan karena apa? bahwa menjaga APBN itu *its not only* kita menjaga *numbers* yang ada disana. Kita menjaga ruhnya ekonomi bangsa, ruhya ekonomi nasional kita. Bagaimana kemudian defisit yang 1,7 itu memberikan dampak terhadap menurunnya jumlah kemiskinan, menaikkan pertumbuhan ekonomi kita secara signifikan. Ketika kita mengatakan bahwa tax ratio kita naik, bahwa disana para wajib pajak, para pembayar pajak itu mereka merasa terlayani oleh negara. Para pembayar pajak merasakan kehadiran mereka, negara itu pada *public services* yang ada mereka rasakan. Nah, inilah rasa yang ingin ditanamkan oleh Bapak Presiden Jokowi, itu *the story behind the number*.

Nah, inilah yang ingin saya sampaikan bahwa perlunya kita para pembantu Presiden itu me-*mantion* setiap keberhasilan itu adalah sebagai keberhasilan

Pemerintahan Jokowi, me-*mention* itu sebagai keberhasilannya Presiden. Kalau Bank Indonesia memang sebagai lembaga yang terpisah. Nah, inilah kalau menurut saya, saya mengingatkan kembali komitmen loyalitas kita secara politik kepada Presiden. Ini penting, karena apa? kalau ini bisa kita dapatkan ruhnya, jiwanya kita bekerja, semangat kita bekerja itu adalah dalam rangka kita untuk apa? untuk perbaikan kita semua dalam berbangsa dan bernegara.

Ini perlu saya ingatkan kembali dalam rangka untuk apa? bahwa kebersamaan kita, dukungan kita politik ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti apa yang menjadi keinginan Presiden itu bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh para pembantu Presiden dengan mengedepankan apa? bahwa ini ada keinginan Presiden bukan keinginannya siapapun. Dan tugas kita yang sama di DPR RI ini adalah untuk mewujudkan itu, karena kita semua ini dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Yang kiri Bapak Sarmuji.

F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Ketua.

**Ketua dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Ibu Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Menteri, Kepala BPS dan seluruh
jajaran yang saya hormati.**

Pertama, selamat tahun baru dan selamat atas performa fiskal dan moneter kita membaik di tahun 2018. Selamat juga Ibu Menteri telah menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia, hampir menjadi Menteri terbaik di hatiku sebenarnya. Cuma ada satu catatan yang mesti saya kemukakan, terutama karena ada sedikit sekali pada keseimbangan primer kita. Keseimbangan primer kita meskipun hanya 0,01% mengalami defisit tetapi tetap saja dibaca defisit. Persepsi orang kenapa tidak bisa surplus, begitu saya lihat di belanja ternyata pada sisi belanja ada peningkatan prosentase yang cukup besar antara 2017 dan 2018. Di 2018 sisi belanja kita nyaris 100%, yaitu 99,8%. Padahal dulu pada waktu kita membahas APBN 2017 kita sangat sering mendengar dari Pemerintah sendiri tentang penghematan alamiah yang disebabkan oleh selalu tidak terserapnya APBN kira-kira 95% biasanya terserap. Selalu kalau kita berbicara tentang kekhawatiran *sort fault* kita selalu dikemukakan dengan penghematan alamiah, karena kebiasaan kita, APBN kita sekitar 95%, tetapi ini nyaris 100%. Apakah ini dikarenakan karena penerimaan kita yang performanya cukup bagus melebihi 100% sehingga belanjanya pun kemudian dikejar sampai

99,8%.

Saya tahu memang ada belanja-belanja tertentu yang kemudian meningkat akibat bencana dan sebagainya, akan tetapi yang saya ingin tahu apakah belanja-belanja seperti itu, itu meningkatkan proporsi belanja kita sampai 99,8%. Jadi kalau itu nanti 2019 kita mengalami surplus keseimbangan primer memang bukan hanya terbaik di dunia tetapi terbaik juga di masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa tercapai.

Yang kedua, tentang reformasi structural. Tadi Bapak Kepala Bappenas/Bapak Menteri menyampaikan tentang reformasi structural. Sebenarnya inikan bahasa yang terus menerus kita ulang-ulang. Problem kita mengandalkan komoditas untuk ekspor itu problem yang lama sekali kita ketahui. Tetapi mengapa ini tidak mampu kita geser? Karena ini tidak ada tindakan-tindakan bisa mempercepat proses reformasi structural. Kira-kira kendalanya itu apa sehingga problem itu berulang dari tahun ke tahun. Dan kalau kita selalu sering mendengarkan ini kita menjadi biasa saja, pasti besok begitu juga Pak Menteri. Jadi mohon ini juga bisa dijelaskan apa sih kendala-kendalanya kita untuk melakukan reformasi structural, sehingga bisa kita atasi bersama-sama. Kita bisa berikan dukungan yang memadai untuk tindakan-tindakan Pemerintah melakukan reformasi structural.

Ketiga, tentang dana desa. Dana desa kita sebenarnya sudah cukup besar meskipun tidak terjadi peningkatan di tahun 2017-2018 sekitar 60 triliun. Tetapi kalau saya melihat data-data yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri dan BPS sendiri, saya bisa menarik prognosis yang mungkin bisa dianggap terlalu dini, akan tetapi efektifitas dana desa untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan itu belum tercapai sepenuhnya. Kalau memang disampaikan, tadi Bapak Menteri juga sampaikan bahwa dana desa ini memang diperuntukan untuk semua orang bukan ditujukan kepada satu katagoris sosial tertentu. Tetapi kalau melihat permasalahannya di desa dan itu permasalahan kita pandang cukup krusial tentu desain dana desa itu peruntukannya bisa digeser seharusnya. Atau ada *guidence-guidance* yang lain yang bisa mempercepat keluarnya persoalan masyarakat desa, baik dari sisi ketimpangan maupun dari kemiskinan.

Kalau ini efektifitasnya kurang itu kan berarti bisa jadi desainnya salah atau memang prioritasnya yang salah dan sebagainya. Awal-awalnya kan infrastruktur sudah bagus, tetapi kalau ini memang belum bisa meningkatkan kesejahteraan atau belum efektif mengangkat kemiskinan, mengurangi kemiskinan berarti kita bisa mengubah desainnya atau menggeser peruntukannya.

Itu barangkali konsen saya, Ibu Menteri dan Bapak Menteri. Saya berharap 2019 persoalan defisit pembayaran defisit neraca perdagangan bisa kita atasi, karena sebenarnya PR Pemerintah Pak Jokowi tidak banyak lagi sebenarnya. Kemiskinan menurun oke, pengangguran oke, tinggal satu hal yang barangkali pertama perlu dipertajam, dipercepat. Kedua, masalah-masalah yang sekarang belum berhasil diselesaikan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan itu harus menjadi konsen kita.

Saya juga tambahkan pertanyaan bagaimana 2019 ini kita bisa mengatasi defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan supaya performa

Pemerintahan ini menjadi lebih baik lagi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saya persilakan Bapak Johnny Plate.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,
Ibu Menteri, Bapak Menteri, Gubernur BI, Kepala BPN dan seluruh jajaran yang kami hormati.**

Yang pertama, walaupun terlambat selamat tahun baru juga, mudah-mudahan tahun 2019 ini menjadi tahun yang memberikan banyak berkah bagi bangsa dan negara kita.

Ibu Menteri dan Bapak-bapak Pimpinan Lembaga yang saya hormati.

Kita tidak bisa hindari dan tidak bisa kita sanggah dan bantah bahwa kita memang di tahun politik. Ruang publik kita di isi dengan berbagai macam informasi yang cenderung ditafsirkan dari sisi politik atau dengan kata lain informasi-informasi publik itu akan menjadi alat politik dan itu dipolitisasi. Karenanya tentu kami sangat berharap bahwa Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait itu perlu menginformasikan dan menyampaikan kepada publik terkait dengan capaian kinerja dan kebijakan dengan bahasa-bahasa rakyat. Kalau disampaikan terlalu teknokratis, teoritis mungkin sudah sulit untuk dipahami oleh masyarakat dan itu terlalu mudah untuk dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan kelompok.

Kami sangat berharap dan mendorong untuk Pimpinan-pimpinan lembaga selalu tampil dan menjelaskan dan kalau perlu lebih pro aktif untuk menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Kami memberikan apresiasi atas kinerja-kinerja penerimaan negara, baik Ibu Menteri capaian-capaian yang hebat. Ada beberapa yang menjadi catatan kami, yang pertama yang terkait dengan tax ratio. Tax ratio kita memang meningkat sedikit tapi jika diperbandingkan dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya, maka itu bisa dianggap sebagai lebih rendah, pada halaman 8 ya. Tahun 2014 sebesar 13,1% dan tahun 2018 diperkirakan 11,5%. Kita ketahui bersama bahwa penerimaan negara 2014 dibandingkan dengan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak 2018, 2018 jauh lebih besar. Tentu rakyat perlu bertanya mengapa itu terjadi dengan bahasa rakyat.

Kita juga ketahui tahun 2014 GDP kita dikisaran 10.500 triliun dan GDP kita sekarang sesuai dengan dokumen yang ada disini 2018 adalah 14.700 triliun atau peningkatan GDP kita dari 2014 sampai dengan 2018 lebih dari 40%, sambil penerimaan negara tidak sebesar itu. Inilah barangkali faktor yang mengakibatkan tx ratio kita juga relative lebih kecil dibandingkan dengan 2014. Dimana ekonomi kita jauh lebih besar dibandingkan 2014. Jadi perlu dengan bahasa yang pas yang disampaikan pada rakyat, jangan sampai kesannya dengan tax ratio kita yang hanya 11,5% ekonomi kita memburuk. Nah, ini yang digambarkan di publik padahal disini yang lain GDP kita jauh lebih besar, 40% jauh lebih besar. Dan ini adalah satu capaian kinerja yang dilakukan Pemerintahan saat ini yang harus dipahami oleh rakyatnya, yang harus disadari betul oleh rakyatnya agar mereka tidak mudah untuk dikelabui dengan data-data.

Yang kedua, hutang luar negeri kita juga digambarkan hutang seolah-olah sebagai hal yang buruk di dalam perekonomian. Kita punya data-data makro disini yang bagus dimana Pemerintah selalu menyampaikan bahwa hutang luar negeri kita dikelola secara lebih akuntable dan dikelola secara lebih kredible. Dan kami memahami itu dan mengetahui itu dan menyetujui bahwa itu dilakukan secara lebih akuntable dan secara lebih kredible. Tentu itu atas dasar apa? Atas dasar data-data makro yang disampaikan dimana setiap tahunnya defisit APBN kita secara prosentase jauh membaik, jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana juga keseimbangan primer kita defisitnya jauh lebih kecil, bahkan tadi Ibu sampaikan hampir 0 Rupiah, tapi dengan bahasa teknokratis seperti ini rakyat tidak tahu itu, tidak paham. Perlu dijelaskan dengan bahasa yang rakyat bahwa hutang luar negeri kita itu memang kita lakukan dan kita kelola dengan baik, dimana hutang-hutang itu digunakan untuk belanja-belanja produktif dan belanja modal negara yang saat ini dirasakan langsung oleh rakyat kita. Dimana manajemen hutang luar negeri tidak ditandai lagi dengan kebocoran-kebocoran, tidak ditandai lagi dengan rensiker-rensiker yang mengambil bagiannya. Bahkan hutang luar negeri sepenuhnya digunakan untuk belanja-belanja demi kepentingan perekonomian nasional.

Ini ruang publik kita harus diisi dengan itu, ruang publik kita juga diisi dengan seolah-olah rakyat sekarang sedang menderita. Semua rakyat lagi miskin, bahkan 90% rakyat tidak berdaya. Itu ruang publik kita diisi dengan begitu, tidak sejalan dengan data-data makro yang disampaikan disini dimana perekonomian kita baik, dimana tingkat kemiskinan kita itu rendah jauh dibandingkan sebelumnya, sudah di bawah 10% 9,86% atau sekitar 25 juta. Satu capaian yang luar biasa tapi dipublik digambarkan Indonesia ini sudah mau bangkrut. Indonesia ini sudah menjadi negara yang dunia keempat kalau bukan dunia ketiga.

Nah, ruang publik ini juga harus disampaikan bahwa tidak begitu adanya, itu adalah retorika politik yang hanya mempengaruhi *swing voters* dan *undecided voters* dan itu tidak baik untuk perekonomian nasional kita. Ini perlu juga dengan bahasa-bahasa rakyat disampaikan. Disampaikan rakyat ini sudah tidak bisa belanja apa-apa lagi, harga naik, biaya mahal dan seterusnya. Sambil di data-data yang disampaikan ini inflasi kita rendah, dikisaran 3,5% bahkan inflasi spasial ada yang dibawah 2% bahkan di bulan-bulan tertentu bahkan deflasi. Tapi digambarkan seolah-olah rakyat

sudah tidak berdaya. Ini lagi mempolitisasi angka-angka makro, kita ini harus dijawab dengan bahasa-bahasa rakyat. Kepada kita juga disampaikan seolah-olah stock beras kita kemampuan bertahannya hanya 3 minggu saja, setelah itu mati seluruh rakyat Indonesia, karena tidak ada makan. Padahal kenyataannya dimana stock pangan kita, khususnya beras kita masih cukup untuk membiayai konsumsi beras untuk 6 bulan. Dan seterusnya-seterusnya ini Pemerintah perlu tampil khususnya di sektor yang menjadi mitra kerja Komisi XI DPR RI karena disinilah data-data makro itu disampaikan untuk diteruskan kepada publik bahwa gambaran-gambaran suram, gambaran-gambaran gelap itu tidak berdasarkan, itu hanya hoax saja.

Ruang publik kita ini terlalu kotor, diisi dengan berita-berita yang tidak benar sambil di ruang rapat kita ini kita boleh melihat data-data capaian kinerja Pemerintahan yang perlu bersama kita banggakan dan yang perlu kita teruskan kepada rakyat, untuk rakyat mengambil bagian dalam kesuksesan pembangunan nasional kita, bukan untuk saling mencibiri hanya untuk kepentingan electoral. Sampai saat ini itulah yang terjadi.

Hutang-hutang BUMN digambarkan seolah-olah BUMN kita ini akan bangkrut, bahkan flekterier kita dibidang sudah mati, sudah tidak bisa tumbuh lagi. Sambil Garuda Indonesia selalu memesan pesawat-pesawat baru, sambil pelayanan-pelayanan jasa penerbangan yang diberikan dari waktu ke waktu membaik, bahkan lembaga-lembaga peringkat airline kita memberikan sertifikasi dan memberikan pujian atau sertifikat-sertifikat capaian yang baik atas pelayanan-pelayanan transportasi udara.

Demikian halnya BUMN-BUMN yang lain yang digambarkan seolah-olah hutangnya sudah begitu besar dan sebentar lagi akan bangkrut dan dunia Indonesia kita kiamat. Nah, hal-hal seperti ini saya kira menjadi kewajiban Komisi XI DPR RI dan menjadi kewajiban mitra-mitra Komisi XI DPR RI untuk menyampaikan kepada publik bahwa tidak demikian perekonomian nasional kita. perekonomian nasional kita masih baik dan perekonomian nasional kita masih bertumbuh dengan baik dan untuk itu perlu kita jaga bersama.

Juga kepada saya ditanyakan bahwa Pemerintah sudah mengeluarkan surat hutang negara sekitar 3 miliar Dolar sebagai *prefunding*. Saya tidak tahu apakah ini betul atau tidak, tapi kalau pun betul ini perlu dijelaskan bahwa *prefunding* yang dilakukan ini untuk *freeze pending*, karena dia berada di tahun anggaran yang berbeda. Tapi digambarkan di ruang publik kita seolah-olah *prefunding* yang dilakukan oleh Pemerintah adalah gambaran dari ketidakberdayaan cash flow Pemerintah dan Pemerintah siap-siap karena ketidakmampuan pembiayaannya. Ini juga perlu digambarkan bahwa *prefunding* ini hanya persiapan-persiapan kalau itu tidak dilakukan, kalau tidak tolong dijelaskan bahwa itu tidak Ibu Menteri. Tapi kalau pun itu dilakukan ini adalah *prefunding* bukan *freeze pending*, ini masih sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan atau sistem cash basis yang kita sepakati bersama sebagai model pencatatan, penerimaan dan belanja negara kita.

Cadangan devisa kita 120 triliun tadi disampaikan per Desember 2018 yang disampaikan juga ini masih cukup untuk membiayai 6,5 atau 6,3 bulan impor dan pembayaran cicilan hutang-hutang luar negeri kita. Juga perlu disampaikan bahwa

kondisi devisa kita ini masih cukup baik dan cukup kuat untuk menahan perekonomian kita. Jangan sampai yang digambarkan hanya defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjalan kita dan seolah-olah perekonomian kita akan hancur. Itu yang digambarkan di ruang publik kita.

Defisit neraca perdagangan kita juga perlu dijelaskan khususnya kepada Kepala Badan Pusat Statistik, komponen-komponen penting apa saja yang ada disitu yang mengakibatkan defisit neraca perdagangan kita. Apakah disitu hanya migas saja atau ada belanja modal, atautkah ada belanja-belanja investasi yang ada disitu yang nanti memungkinkan justru pergerakan dan dinamisnya ekonominya kita di waktu-waktu yang akan datang atau ada barang-barang modal yang temporary impor. Yang diimpor hanya untuk kepentingan pembangunan pabrik, pembangunan tambang, alat-alat berat dan seterusnya yang setelah selesai melaksanakan tugasnya akan diekspor kembali. Kualitas neraca perdagangan kita perlu dijelaskan kepada masyarakat dengan bahas rakyat juga bahwa bukan kiamat tetapi dia bagian dari memang hasil atau efek dari bertumbuhnya investasi foreign direct investment di dalam negeri kita.

Hal-hal seperti ini barangkali perlu kita jelaskan karena 3 bulan kedepan ruang publik kita akan semakin kotor kalau kita tidak memberikan informasi yang memadai dan akurat yang dapat di mengerti dengan bahasa rakyat.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terus pertanyaannya apa?

Ini sudah kayak juru bicara Pemerintah ini.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Memang Fraksi Pemerintah disini Pak.

KETUA RAPAT:

Ibu Elviana.

F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Komisi XI DPR RI, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,

Ibu Menteri beserta Bapak Wamen, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Bapak Kepala BPS beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Pertama selamat tahun baru juga, semoga kita semua semakin sukses, aamiin. Ibu Menteri, terutama selamat atas capaian penerimaan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak kita tahun ini melebihi APBN. Itu informasi dari media yang saya dapat dan saya salut dengan optimisme Ibu. Saya ingat betul istilah Ibu begitu bergabung disini anggaran yang kredible, anggaran akuntable, sehingga itu memang dibuktikan sampai sekarang.

Kemudian saya juga melihat optimisme Ibu Menteri, *outlook* terhadap kondisi kita tahun 2019. Namun, dari paparan BPS ada beberapa hal yang saya sebagai orang daerah, pertanian perkebunan melihat ini benar terjadi. Pertama, diprediksi tren harga komoditas pertanian dan perkebunan tahun 2019 halaman 3 di BPS. Pertama, harga kelapa sawit turun, padahal ini sudah menumbuhkan optimisme sekarang. Awal-awal tahun 2018, sawit itu di tingkat pabrik itu 1.800 lalu *down* di pertengahan sampai akhir kemarin sampai 1.000 sekarang naik 40% 1.450 per kilonya. Tapi kalau diprediksi seperti sekarang turun, saya pikir ini menjadi perhatian yang khusus juga bagi tim ekonomi yang merupakan bagian dari Komisi XI DPR RI.

Pertama, memang walaupun ini perusahaan besar tetapi juga rakyat-rakyat yang mulai mengubah karetnya menjadi sawit sekarang. Saya lihat juga karet stagnan, artinya ditingkat perkebunan, di tingkat rakyat yang berusaha dengan perkebunan tahun 2019 bagaimana kita meyakinkan bahwa ekonominya tidak suram, apa yang harus dilakukan.

Kemudian saya tidak melihat waktu Ibu Menteri paparan tentang perkembangan penerimaan sectoral yang *double digit*. Apakah benar pariwisata tidak masuk? Karena saya lihat pariwisata sekarang bukan hanya tumbuh kembang di daerah-daerah seperti Bali dan Lombok, tapi hampir semua kabupaten sekarang punya *image* sendiri-sendiri, walaupun bukan mancanegara yang berkunjung, tapi perputaran pariwisata lokal itu sangat tinggi. Saya pikir menurut pandangan saya, BPS luput memantau dan perkiraan saya kalau melihat di lapangan pariwisata juga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang dua digit itu.

Kemudian kembali ke perkiraan ekonomi kita tahun 2019, ketika sawit dan karet turun saya melihat Ibu Menteri, ada dua program kita yang sangat bagus yang saya minta ini menjadi perhatian khusus terutama program ultra mikro yang sudah kita bahas disini. Itu dengan pinjaman 2 juta untuk Ibu-ibu rumah tangga, kan minggu ke-31 dia bisa lompat pinjamannya ke 10 juta kalau ekonominya meningkat. Itu yang melompat menjadi peminjam 10 juta itu lebih dari separuh, artinya terjadi peningkatan ekonomi mereka, kelompok-kelompok Ibu-ibu yang meminjam melalui program ultra mikro ini.

Namun, saya pesan saja kepada Ibu Menteri karena saya lihat Dirut PNM tidak hadir. Terlalu berbelit-belit, terlalu sulit padahal Ibu-ibu itukan sekali saja mereka ditolak itu langsung merajuk. Mereka sudah kumpul tahu-tahu PMN-nya mengatakan tidak memenuhi syarat, ini coret, ini coret, kalau coret semua anggarannya akan diberikan kemana gitu. Jadi kalau Kemenkeu dengan diberikan kepada PIP dan PNM sukses mengelola UMI tahun 2019 ini saya yakin optimisme Ibu Menteri akan tercapai.

Satu lagi BPD PKS Ibu, kita sudah membuat mereka mendorong disini

memberikan dana replanting sawit. Tetapi ada syarat satu yang sulit dananya cair ke mereka, yaitu harus ada birokrasi yang berbelit di tingkat kabupaten. Sayangnya Panja kita belum jalan, kalau Panjanya jalan kita akan usulkan tidak perlu persetujuan-persetujuan berbelit di tingkat kabupaten khususnya replanting sawit yang di-drop dari mana BPD PKS. Karena waktu kita turun membawa tim BPD PKS itu tim Kementerian Perekonomian ikut turun. Jadi inikan sudah bukan hanya digarap oleh BPD PKS akan tetapi Kementerian Perekonomian juga ikut disitu. Dan realisasinya di Jambi itu masih minim karena sekali lagi ada Bupati-bupati yang tidak begitu serius mengurus hal-hal seperti ini.

Demikian Ibu Menteri, semoga optimisme kita tercapai tahun 2019 ini, aamiin.

Terima kasih.

Mohon maaf kalau ada salah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Mau bertanya Pak?

Silakan.

F-PPP (Dr. H. MZ. AMARUL TAMIM, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Ibu Menteri, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas,
Kepala BPS yang saya hormati beserta seluruh jajarannya.**

Jadi saya juga menyampaikan selamat tahun baru, semoga kita sukses di tahun-tahun mendatang. Kalau melihat tadi paparan dari Ibu dan Bapak-bapak sekalian, saya kira kita memberikan dari kerja keras dan hasil-hasil yang dicapai. Namun kalau kita melihat paparan dari Kepala Bappenas ada hal yang memang menjadi tantangan kita ke depan. Dimana ekspor kita yang masih berbasis komoditas, kemudian investasi yang harus tetap digenjut dan kualitas dari sumber daya manusia kita. Ini tantangan kita ke depan.

Kemudian kalau kita lihat dengan fenomena yang ada, fenomena kita lihat terkait dengan sumber daya manusia Pak. Beberapa waktu yang lalu kita selalu diskusi terkait dengan banjirnya tenaga kerja asing. Saya kira itu wajar karena untuk mengisi ruang-ruang kosong yang memang belum kita miliki tenaga kerja seperti yang diberikan oleh asing itu.

Tapi da fenomena yang kita lihat bahwa langkah untuk menyiapkan sumber daya manusia kita dilapangan tidak, transfer daerah tadi digambarkan cukup besar,

Pemerintah Daerah juga tidak ada kebijakan-kebijakan bagaimana mendorong untuk meningkatkan sumber daya manusianya di daerah seperti membentuk BLK-BLK. Ini kelihatan masih rendah sekali, masih kecil. Jadi tantangan kita ke depan tidak diambil langkah-langkah oleh pihak-pihak yang seharusnya menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas itu melalui pelatihan-pelatihan melalui BLK-BLK. Kalau kita bandingkan dengan peringkat berapa itu saya lupa, itu di daerah BLK-BLK tumbuh, tetapi terakhir ini kita melihat di daerah malah bekas-bekas BLK-BLK yang lalu itu, itu menjadi fasilitas nganggur dan tidak termanfaatkan. Itu yang pertama.

Yang kedua, kita juga tadi dikatakan bahwa potensi kita ke depan itu di sektor di pariwisata. Saya kira kita harus mengakui bahwa obyek pariwisata kita, kita unggul. Semua daerah mempunyai keunggulan di sektor dan khususnya terkait dengan obyek pariwisata kita. Tapi persoalan kita talenta masyarakat kita itu tidak kesitu, kita punya masyarakat, masyarakat berbasis petani, nelayan dan lain sebagainya hidup di atas lokasi obyek yang memang sebenarnya ini surga, tapi talentanya talenta nelayan, talenta petani. Oleh sebab itu, mungkin ada satu langkah bagaimana kita membangkitkan talenta itu, apakah melalui Pendidikan paud mulai dari SD dan lain sebagainya ada kurikulum masuk terkait dengan bagaimana pariwisata itu.

Kemudian ya ini kenapa saya ngomong begitu, saya coba mengikuti beberapa bulan ini program BSBY yang menyentuh pariwisata. Sentuhan kecil-kecil tapi itu bisa merubah dan ini kalau mungkin dilakukan secara massif, saya kira ini apalagi dengan media sosial yang sudah bisa memberikan informasi terkait dengan obyek, saya kira ini menjadi potensi yang besar untuk membangun sektor pariwisata kita.

Kemudian yang lain, regenerasi di pertanian Pak. Saya ini pernah birokrasi yang pernah camat dan lain sebagainya, sekian puluh tahun yang lalu saya jadi camat. Saya datang di daerah-daerah itu, petani yang 30 tahun lalu masih jadi petani, regenerasinya tidak ada. Ketika tahun 1998 di Sulawesi Tenggara itu boomingnya komoditas kakao dan lain sebagainya, petani yang terjun pada waktu itu kami datang masih orang itu juga, regenerasi tidak ada. Nah, ini perlu diambil langkah-langkah agar jangan sampai persoalan kita di sektor pertanian kita ini, kita nanti soal tenaga kerja petani ini yang tidak ada.

Kemudian yang berikutnya Bapak Gubernur Bank Indonesia, tadi ada saya dengar terkait dengan keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur ke depan, tadi ada penjelasan Bapak Gubernur tadi. Saya ingin kira-kira yang model yang bagaimana keterlibatan, kan seperti selama ini ada PINA, ada Peraturan Pemerintah itu cukup memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di daerah dengan Bank Indonesia ini bagaimana kedepannya terkait dengan infrastruktur.

Kemudian terkait dengan mungkin soal ekonomi secara nasional dengan peran-peran daerah. Saya belum pernah mendapatkan gambaran tentang berapa persen yang harus idealnya di satu daerah itu yang beredar, karena dengan pembangunan seperti ini, ini kelihatan lari ke Jawa semua. Seperti kapal-kapal yang membawa peti kemas, bawa ke daerah penuh, berbagai komoditas, kembalinya kosong. Artinya, membeli barang banyak yang di Jawa bawa ke daerah. Ini idealnya mungkin konsep dalam menjaga keseimbangan dan pemerataan ini kira-kira idealnya satu daerah ini bisa uang beredar ini berapa, sehingga kebijakan pembangunan itu,

track and down-nya itu membumi di daerah. Ini besaran transfer daerah dengan dana desa pembangunan infrastruktur tapi begitu kita tengok ini uang seperti di daerah kalau hari Jumat, Kamis, itu kelihatan terjadi *rush* ada orang keluar dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu untuk beberapa hal.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ini jam 17.10 WIB kita diperpanjang sampai 17.30 WIB ya.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Pak Ketua, kalau menurut saya diperpanjang tapi kalau menurut saya tinggal dijawab sebentar langsung tertulis saja.

KETUA RAPAT:

Iya, kita diperpanjang dulu ya.
Silakan Ibu Tutik.

F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M., M.Kes.):

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

Mungkin saya singkat saja untuk mempersingkat waktu juga. Hanya sedikit menambahkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa capaian kinerja dari Pemerintah di tahun 2018 ini yang trennya cenderung membaik ini bisa kami terima. Kebijakan-kebijakan Pemerintah di tataran Pemerintah Pusat masih belum secara utuh implementasinya dilaksanakan di daerah. Jadi hubungan antara pusat dan daerah kelihatannya masih belum satu jalur, khususnya mengenai harmonisasi regulasinya.

Mungkin terasa sekali bahwa otonomi daerah ini masih ada hambatan-hambatan dimana Pimpinan daerah masih ada keinginan untuk mempersulit masalah perizinan untuk investasi. Jadi saya harapkan mungkin dari Pemerintah agar bagaimana kontrol terhadap Pemerintah Daerah atau disampaikan dalam rapat-rapat koordinasi bahwa Pemerintah Pusat harus melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaannya dilapangan walaupun beberapa Perda yang mempersulit iklim investasi harus dihapuskan. Dimana kita memang betul-betul ingin menggenjot ekspor masih terasa di daerah itu regulasi-regulasinya masih ada yang mempersulit ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah.

Mungkin itu masukan dari saya.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.
Terakhir dari saya.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Bapak Bambang, ini saya masih tergelitik dengan soal tadi NTT. Ini saya harus kasih tahu karena mungkin Bapak Bambang atau Menteri-menteri yang lain lihatnya dari kaca mata kota. Tidak pernah turun langsung ke bawah, kayak Bapak Johnny ini kebawah terus, supaya nanti bulan April terpilih lagi.

Jadi begini Pak, masih banyak di daerah saya bicara NTT saja dulu. Daerah yang terpencil, terbelakang dan termiskin, ini ter semua Pak. Saya sering kirim foto ke Ibu Sri Mulyani, itu saya ingin kasih tahu bahwa kondisi jalan yang hancur-hancuran. Itu yang membuat orang semakin miskin, karena apa? untuk mencapai satu kampung, satu desa, itu harus mengeluarkan biaya transport yang begitu tinggi. Kita bisa semen di kota kabupaten itu 60.000 sampai 70.000 di kampung sana 350.000. Kita bisa beli beras 10.000 di kampung sana 30.000. Kita bisa beli gula di kota berapa misalnya saya tidak tahu harga gula berapa, disana 3 sampai 4 kali lipat, itu fakta.

Kita tidak bisa bilang kepada orang yang terjauh itu “you jangan makan nasi, you jangan beli gula”, tidak mungkin Pak. Mereka butuh beras, mereka butuh gula, tapi yang harus disiapkan oleh Pemerintah itu jalannya. Nah, ini apa? kalau jalan tol dibangun terus tidak juga membuat orang di kampung menjadi sejahtera. Saya apresiasi Pak Jokowi membangun jalan tol oke, tapi harus dibangun juga jalan-jalan di daerah yang masuk itu. Tapi kalau hanya mengandalkan dana DAU dan DAK yang 90% isinya untuk biaya operasional Pemerintah, 10% dibagi-bagi untuk berbagai macam sektor. Jalan di daerah-daerah yang tertinggal itu tidak akan pernah baik. Kalau jalan tidak pernah baik, kemiskinan tidak akan pernah terbaiki.

Oleh karena itu, yang saya minta kepada Menteri Bappenas, buat afirmasi program Pak. Kan disini Bapak Bambang sebagai Menteri Bappenas membuat RKP dengan KL-KI yang cari duit Menteri Keuangan, nanti yang survey BPS, kan tugasnya itu. Justru ini ada di tangan Bapak Bambang gitu loh, kita malu kita rapat sampai tengah malam kalau kita tidak bisa mengeluarkan satu kebijakan yang afirmasi yang bisa menyelesaikan masalah Pak. Kita duduk 10 tahun lagi, sama Pak, NTT tidak akan keluar dari kemiskinan kalau jalannya model begitu. Saya sama Johnny masuk kesana, kita menangis ngelihat, rumah orang bisa ditopang sama bamboo karena sudah mau jatuh. Mereka tidak bisa bangun rumah baru Pak, tidak bisa beli semen. Tapi kalau jalan itu sudah diberesin langsung biaya transportnya murah, inflasi di kampung itu akan murah, daya beli mereka akan tinggi, itu ilmu ekonomi yang paling dasar.

Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, tolong dimasukkan program itu, supaya yang namanya IPM, supaya yang namanya Gini Ratio itu bukan hanya Gini Ratio di kota-kota atau IPM di kota-kota. Tapi itu sampai di merekam, di kampung-kampung di pulau-pulau, itu baru kita merasakan denyut daripada satu pembangunan.

Kita tidak bisa salahkan orang masih teriak bahwa Pemerintah tidak performa dan segala macam karena itu masih dirasakan.

Oleh karena itu, ini ada bagusnya tadi Bapak Bambang menyampaikan bahwa NTT masih rentan. Sekarang saya buka, kapan Bapak Bambang mau lihat kampung disana, asal cukup saja pinggangnya kuat. perjalanannya berjam-jam dan jalannya bukan jalan mulus kayak disini Pak. jalannya yang setengah mati, belum kalau mobil kita mogpk di tengah jalan, itu kendala yang dihadapi oleh saya sama Bapak Johnny Pak, nginap di kampung-kampung itu.

Nah, ini saya titip kepada Bapak Bambang, supaya berikut itu sudah ada *afirmasi action*, macam-macam. Bapak-bapak dan Ibu Menteri kan pemutus kebijakan fiskal. Ada kebijakan misalnya DAK-nya lebih diprioritaskan kepada pembangunan jalan, kan bisa. Tapi kalau DAK dan DAU disuruh bagi ada 14 sektor pembangunan, tidak akan bisa Pak. Kita mau alirin semua itu dana anggaran kementerian masuk ke daerah, kalau tidak ada afirmasi yang langsung fokus pasti yang akan dibangun itu hanya di kota.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Jalan di daerah itu ada 3 katagori, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan negara. Jalan negara mulus semua, jalan kabupaten relative mulus, jalan provinsi parah semua, karena provinsi tidak ada anggaran. Ini Pak, kebijakan dasar yang Bapak-bapak harus buat, supaya antara jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara itu sama Pak, kalau tidak habis jalan mulus masuk jalan provinsi hancur-hancuran, masuk ke jalan kabupaten agak mulus, masuk jalan kampung agak parah. Jalan kampung sekarang sudah agak mendingan karena ada dana desa, sudah mulai masuk itu 1 sampai 2 miliar per desa, mereka bangun jalan desa. Inikan jadi bopeng-bopeng jalanan kita, ini fakta dilapangan yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian harus paham.

Jadi turun kelapangan Pak, jangan kita dikasih laporan yang seolah-olah ini rentan, pasti rentan sampai 20 tahun lagi kalau model program pembangunannya begini saja, yang penting sudah kasih DAU, ya tidak akan bisa Pak, mau Bupatiya sehebat apapun tidak bisa Pak. Sekarang ada BLU SMI dia bisa mempercepat proses pembangunan tapi kalau misalnya laporan keuangan daerahnya belum WTP tidak bisa dikasih. Ini masalah-masalah yang sebetulnya harus yang riil yang harus diselesaikan, baru manfaat Rapat Kerja model begini ada manfaatnya Pak.

Saya apresiasi terhadap *performance* daripada APBN kita tapi akan jauh lebih bisa kita apresiasi kalau rakyat di bawah di kampung halaman, di kampung-kampung, di pulau-pulau itu bisa merasakan. Itu yang tadi Bapak Misbakhun bilang denyutnya berasa, rasanya ada, citranya ada.

Jadi itu saja dari saya, supaya kita bisa memperbaiki ke depan catatan-catatan tadi itu bisa kita perbaiki dengan adanya sau afirmasi kebijakan. Itu dari saya.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Pimpinan, boleh tambah sedikit saja Pimpinan.

Ini kebetulan dipancing sama Bapak Ketua, saya ingin sampaikan kepada Ibu Menteri, Bapak Menteri Bappenas. Di NTT ada 2000 kilo meter jalan provinsi dan setiap tahun yang tersedia alokasi dananya hanya yang kebutuhan 50 kilo meter atau di sana ada 22 kabupaten/kota atau hanya 2 kilo meter per kabupaten/kota secara rata-rata. Dan jalannya semuanya hancur Pak, itu yang pertama.

Yang kedua, disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, ada jalan negara. Ada satu jalan negara di trans utara Flores yang belum selesai dibangun Pak, sudah berpuluhan tahun Pak, sudah berpuluhan tahun belum selesai Pak. Jadi belum tersambung dari timur sampai barat termasuk di ujung baratnya yang Ibu Menteri kesana, namanya Labuan Bajo. Itu Trans Utara belum terhubung dan saya sudah pergi di ujung barat masih hutan. Saya jalan di trans Utara Flores itu dibagian timurnya, kebetulan jalannya malam Pak Ketua. Saya sampai di satu jembatan yang sudah putus dibawa hanyut sama banjir, mobil saja masuk ke kali dulu untuk melewatinya bolak-balik.

Ini Trans Utara Flores yang dibangun sebagai jalan negara yang belum selesai dan yang sudah dibangun jembatannya pun rubuh dibawa sama banjir, itu di Kabupaten Sikka namanya. Itu putus dan sampai sekarang ini belum, saya tidak tahu sudah ada dananya di 2019 apa belum, saya belum tahu dan saya belum cek. Tapi itu putus itu berarti jalan urat nadinya putus dan mobil-mobil apalagi truk harus lewat kali. Kebetulan mobil saya juga lewat kali.

Nah, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan Gubernur atau Provinsi NTT dikasih alokasi dana per tahun sekitar 4 triliun. Termasuk di dalamnya DAU yang hampir 60%. Nah, itu sudah jelas tidak cukup untuk membiayai, *maintenance* jalan saja tidak cukup untuk jalan provinsi. Saya kira ini perlu menjadi perhatian betul-betul kebijakan kita untuk mengatasi beberapa “ter” yang disampaikan oleh Bapak Ketua, terluar, terpinggirkan, termiskin, tersusah dan sebagainya “ter” yang konotasinya tidak bagus untuk perekonomian rakyat.

Terima kasih Bapak Ketua, sekedar untuk menginformasikan ini perlu perhatian secara khusus. Jalan utama sudah kita keluarkan dana dari APBN Trans Utara Flores, itu saya kira sudah puluhan bahkan ratusan triliun, tapi belum selesai dibangun. Ini saya minta untuk diselesaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, kami persilakan Ibu Menteri bisa memberikan penjelasan singkat, mungkin detailnya bisa di jawaban tertulis.

Kami persilakan Ibu.

MENTERI KEUANGAN RI:

Terima kasih Pimpinan.

Pertama, saya menyampaikan apresiasi terhadap masukan-masukan yang disampaikan oleh seluruh Anggota dan Pimpinan Komisi XI DPR RI untuk kami terus memperbaiki kinerja dari APBN. Saya rasa kita memiliki kesamaan tujuan dan pandangan mengenai hal itu. Termasuk hal-hal yang dibutuhkan di dalam menjaga agar *policy* ataupun legislasi itu mencerminkan kebutuhan daripada perekonomian.

Beberapa hal yang ditanyakan dalam hal ini, tadi bagaimana APBN bisa memberikan afirmasi lebih banyak di dalam hal-hal yang sifatnya pengentasan kemiskinan dan juga untuk mengurangi kesenjangan. Dari tadi Bapak Sarmuji mengenai dana desa, bagaimana untuk bisa lebih mencerminkan kebutuhan untuk pengurangan kemiskinan dan kita sudah memulai di tahun 2019 dengan mengubah formula alokasinya. Sekarang dengan alokasi dasar, yaitu yang sifatnya umum dibagi rata. Tadinya prosentasinya 77% sekarang diturunkan ke 72%, artinya yang 28% yang tadinya hanya 23%, 28% itu dialokasikan antar desa itu dengan formula yang lebih mencerminkan konsentrasi kemiskinan. Jadi pembagian antar desanya saja yang meningkat untuk semakin banyak desa yang kurang kemampuannya dan makin tinggi kemiskinannya atau semakin tertinggal, maka akan diberikan lebih banyak alokasinya. 3% untuk daerah yang jumlah penduduk miskinnya paling tinggi.

Kemudian kita juga menambahkan alokasi formula untuk bobor dari sisi penduduk miskin dinaikkan dari 20% menjadi 25%. Jadi artinya nanti angka 70 triliun di dalam dana desa ini formula pembagiannya akan lebih mencerminkan kepada daerah-daerah yang memang konsentrasi penduduk miskinnya dan jumlah penduduk miskinnya semakin tinggi.

Kita juga melakukan perubahan di 2019 agar porsi dana desa itu untuk kesejahteraan melalui program-program pemberdayaan masyarakat di dalam rangka untuk mendorong ekonomi desa juga ditingkatkan. Tadi disampaikan mungkin peranan dari perangkat desa di dalam pengelolaan dana desa menjadi penting. Oleh karena itu, kapasitas dari perangkat desa menjadi penting. Kemarin Bapak Presiden telah menyampaikan dan itu kita akomodasikan di dalam peraturan bagaimana mereka mendapatkan tidak hanya dari sisi *income*-nya, namun juga kapasitasnya di tingkatkan. Sekarang BPKP maupun Kementerian Desa juga sudah turun bisa meningkatkan kapasitas dari perangkat desa.

Dan kita akan terus melanjutkan program padat karya tunai yang tentu akan masuk langsung kepada masyarakat, terutama di desa yang kelompok miskin. Untuk yang tadi disampaikan Bapak Sarmuji mengenai kapasitas SDM dengan merefleksikan bagaimana lembaga-lembaga di daerah yang berhubungan dengan DAK bisa semakin di-*empower* termasuk BLK yang tadi juga yang dari Bapak Amirul Tamim.

Sebenarnya program untuk DAK fisik dalam rangka untuk Pendidikan vokasi telah ditingkatkan, terutama untuk pembangunan dan perbaikan ruang belajar serta pengadaan alat praktek. Dan DAK Non Fisik untuk pelatihan usaha kecil sekarang juga di-*introduc*. Jadi artinya, DAK yang non fisik tidak hanya dari sisi untuk

memberikan biaya operasi sekolah dan guru, namun juga untuk melakukan kegiatan pelatihan untuk usaha kecil menengah.

Saya tahu bahwa Kementerian Industri maupun Kementerian Tenaga Kerja juga memiliki program vokasi yang langsung disampaikan ke daerah, umpamanya di Kementerian Tenaga Kerja itu ada 1000 pesantren yang akan ditingkatkan dari sisi kemampuan *skill*-nya dan juga dari sisi tambahan anggaran untuk meningkatkan kapasitas BLK untuk Pendidikan vokasi juga ditambahkan anggaran, kalau tidak salah ada 1 triliun tambahan dan juga di Kementerian Perindustrian. Jadi memang kita melihat beberapa kementerian sudah memfokuskan tentu pertanyaannya dimana mereka dilakukan, bagaimana kurikulumnya atau pelatihannya itu menjadi sangat penting.

Saya sepakat yang disampaikan dan menurut saya tidak ada perbedaan, Bapak Misbakhun memberikan penekanan bahwa kita perlu untuk meningkatkan tidak hanya dari angka dan menjadi citra akan tetapi juga menjadi rasa dan itu yang kita coba lakukan di dalam komunikasi publik kita. Kita sebagai pembantu Presiden saya rasa tidak ada pertanyaan mengenai itu. Di setiap komunikasi kami selalu kami menempatkan bahwa kementerian Keuangan sebagai institusi dan saya sebagai Menteri Keuangan adalah sebagai pembantu Presiden, karena memang itu faktanya dan kita terus melakukan dan menyampaikan itu.

Tentu kalau dalam komunikasi politik di dalam tadi yang disampaikan oleh Bapak Misbakhun, Bapak Johnny Plate itu adalah sesuatu realita menjelang Pemilu dan kita juga sangat sadar pentingnya bagi kita terutama untuk menghilangkan berbagai kemungkinan memasukkan pertama informasi yang tidak akurat. Yang kedua, menciptakan hal-hal yang sifatnya *misleading*, karena pada akhirnya pilihan ini adalah pilihan mengenai bagaimana mengelola Republik Indonesia dan kita bertanggungjawab untuk memberikan seluruh informasi dan menjelaskan kepada masyarakat.

Mengenai berbagai pertanyaan Bapak Johnny Plate yang khusus mengenai prefunding. Prefunding ini sudah dilakukan semenjak tahun 2016, pada dasarnya ini adalah merupakan strategi pembiayaan. Undang-Undang APBN kita telah memberikan mengenai jumlah anggaran, baik dari sisi estimasi penerimaan dan belanja. Dan oleh karena itu, berapa estimasi defisit di satu tahun anggaran. Namun, kita diperbolehkan melakukan prefunding di dalam rangka kita untuk melakukan strategi pembiayaan untuk mencari biaya yang ringan dan kapan serta bagaimana strategi kita untuk masuk pasar di dalam rangka untuk mendapatkan pembiayaan yang paling baik, risikonya paling rendah.

Terus terang sebetulnya kalau prefunding di dalam kurun waktu 2016, 2017, 2018 ini kalau Bapak Johnny Plate pasti tidak sulit untuk memahami, karena kita mengantisipasi bahwa tren suku bunga akan meningkat terus. Jadi kadang-kadang kita memang mengambil posisi untuk melakukan prefunding pada saat pasar kalem dan kita sudah tahu bahwa mencuri waktu atau start di dalam rangka untuk menghindari kemungkinan *announcement* kenaikan suku bunga. Jadi ini adalah *purely strategy*.

Kalau kita berbicara tentang kebutuhan *cash flow* awal tahun apalagi dengan silva itu *totally* tidak benar dalam hal ini. Namun, semua negara di dunia saya juga akan tanya kepada seluruh kementerian uang di seluruh dunia, kalau tanggal 1 Januari mau negara kaya, mau negara miskin kan mereka belum ada penerimaan pajak. Jadi memang kalau yang namanya *cash flow* itu adalah sesuatu yang harus dan ini kita sudah mengetahui di semua negara. Dan kita dengan adanya silva tentunya memiliki kemampuan untuk melakukan *financing* pada tanggal 1 mau negara kaya, mau negara miskin seluruh gaji harus dibayarkan, transfer ke daerah harus kita bayarkan.

Jadi itulah yang harus kita sediakan dan oleh karena itu, kita sering juga melakukan strategi menggunakan silva maupun melakukan prefunding. Dan sebetulnya kalau kita lihat juga *timing is very important* kadang-kadang kita lihat negara-negara lain belum siap kita sudah masuk duluan ke *market* karena itu tujuannya juga bagus. Kita tidak kompit dengan negara-negara lain dan juga pada saat itu biasanya kita akan lihat negara yang sudah punya *track record* baik, reputasinya sudah dikenal, maka akan bisa melakukan *very quick transaction* yang sangat efisien. Jadi sebenarnya cerita ini lebih cerita positif.

Saya tahu Pak Johnny Plate, bahwa di dalam suasana politik bahkan prestasi pun bisa di-spin menjadi aib. Jadikan itu kan memang sesuatu yang kita harus terus yakinkan kepada masyarakat. Kami juga tentu saja tidak tinggal diam karena banyak sekali yang dilakukan topik-topik yang berhubungan dengan keuangan negara, apakah itu APBN, pembiayaan, penerimaan pajak, utang, itu semuanya menjadi satu topik yang sangat konkrit dan real dan kita terus melakukan *counter* terhadap hal-hal apalagi yang sifatnya tadi misleading dan memang tujuannya untuk menyesatkan pemahaman masyarakat.

Untuk tadi Ibu Elviana mengenai pariwisata, sebetulnya sektor pariwisata itu memang tidak keluar secara sendiri. Mungkin nanti dari Kepala BPS bisa menyampaikan bahwa tidak ada yang disebut sektor pariwisata sebagai kategori statistik. Tapi kegiatan yang sebetulnya masuk dalam keluarga pariwisata seperti hotel, restoran, perdagangan, telekomunikasi, hiburan, transportasi, itu semuanya adalah masuk di dalam. Sehingga memang sektor pariwisata itu masuk dalam berbagai macam kategori di dalam statistik. Namun, kalau kita bicara tentang pajak kami bisa mengantisipasi penerimaan pajak dari industry pariwisata. Tahun 2016 sekitar 1 triliun, 2017 naik menjadi 1,17 dan 2018 naik menjadi 1,45.

Kalau kita bicara tentang gross-nya naiknya persis seperti yang dikatakan oleh Ibu Elviana tadi, tumbuhnya dari 7% naik meloncat menjadi 24%. Jadi memang fenomena terutama karena kita sebut generasi milenial yang lebih menghargai apa yang disebut dengan *experience, consumption* dan kalau growing middle class di Republik Indonesia memungkinkan munculnya baik wisata dalam negeri maupun wisata dari luar negeri dan munculnya berbagai Pemerintahan Daerah yang mengembangkan sektor atau daerah destinasi atau daerah yang menarik saja. Sekarang ini yang namanya destinasi pariwisata itu bisa café yang begitu sangat viral dan orang ingin kesana. Jadi tidak selalu harus sesuatu yang sangat distinguish dari sisi lingkungan alam, karena memang mereka banyak sekali yang melakukan. Ada

wisata kuliner, ada wisata budaya, ada wisata alam, jadi opsinya banyak sekali dan setiap daerah sekarang juga memiliki kreatifitas yang semakin tinggi. Tapi kami tentu akan terus memantau dan sebagai instrument APBN kita akan gunakan untuk terus memperbaiki.

Saya rasa mungkin itu yang dari kami mengenai apalagi yang bisa kami....

F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):

Tolong *comment* tentang umi.

MENTERI KEUANGAN RI:

Ibu betul, yang sudah disampaikan Ibu berkali-kali mengenai PMN dan kita sudah minta supaya pertama prosesnya tidak berbelit-belit dan mengenai target *growth*-nya. Memang kalau dilihat dari populasi dari ultra mikro yang saya rasa jumlahnya mungkin mencapai puluhan juta, 30-jutaan kalau kita bicara pengusaha yang tadi disampaikan oleh Bapak Bambang yang kebutuhan kreditnya di bawah 10 juta. Dengan adanya ultra mikro yang kita *introduce* sekarang ini Ibu, kita baru bisa mencakup mungkin sekitar 1,2 juta. Jadi bagaimana pun juga kita memang membutuhkan volume yang lebih banyak dan ini nanti kita akan lihat di dalam APBN selanjutnya bagaimana antara KUR, ultra mikro itu akan semakin bisa diperkuta di dalam kemampuan untuk memberikan dorongan kepada para pengusaha kecil tersebut.

Mengenai BPD PKS nanti kami akan sampaikan juga kepada pengurusnya dan juga kepada tim kami yang ada di sana, agar tadi yang disebutkan birokrasi tidak berbelit-belit sehingga bisa jalan replanting. Karena memang penyerapan dana replantingnya masih sangat rendah Ibu, yang saya lihat *performance* di situ perlu untuk dinaikkan.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari tadi Ibu Tuti saya setuju antara pusat dan daerah dan kita terus menggunakan insentif fiskal kita untuk daerah itu semakin memperbaiki lingkungan investasi mereka. Jadi kita menggunakan *insentif versus punishment*. Kalau yang insentif semakin baik yang kita akan memberikan reward dalam bentuk DID maupun dalam berbagai instrument fiskal yang kita bisa lakukan.

Bapak Melchi, saya setuju dan Bapak Melchi sudah sering menyampaikan "inilah Ibu di daerah yang masih terpencil", yang benar-benar kalau kita lihat dan saya beberapa waktu terakhir ini ada di daerah timur Indonesia terus, di Saumlaki kami, kemudian kami ke Sorong. Nanti kami akan Bapak Melchi juga mengundang ketempatnya Bapak, kita juga akan mungkin ke Manado dan kemudian dan Sangihe, itu semuanya tujuannya adalah untuk bagi saya juga memberikan semangat bagi tim Kementerian Keuangan karena kita punya instansi vertical, mereka bertugas sampai ke daerah terpencil.

Dan kami ingin memberikan dorongan kepada mereka untuk semakin memberikan *feedback* terhadap policy-policy, karena bagaimana pun juga konektivitas

dan tadi yang disebutkan oleh Bapak Melchi atau Bapak Johnny Plate saya 100% sangat setuju terhadap pentingnya kita melakukan afirmasi.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, memang penting turun ke daerah Ibu, supaya pada saat nyusun APBN itu tahu latar belakangnya dan bisa menyelesaikan masalah yang ada, yang actual. Mudah-mudahan APBN yang berikutnya bisa lebih fokus kepada masalah-masalah yang dihadapi itu.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Sedikit saja Bapak Ketua, untuk Bapak Suryanto saja.

Ini tadi Ibu Elviana bisik-bisik sama saya Bapak Suryanto, kami juga sudah punya keahlian petugas Sensus katanya. Karena apa? karena kami datang dari rumah ke rumah untuk Sensus itu penduduk mikro campaign. Karenanya juga kami pasti tahu apa kondisi yang sebenarnya ada di rumah-rumah masyarakat di kampung-kampung. Jadi kalau kita menyampaikannya disini ya bukan untuk apa-apa hanya sekedar transmisi apa yang menjadi harapan masyarakat di Dapil.

Mudah-mudahan secara afirmatif nanti itu bisa diterjemahkan dalam kebijakan negara.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau tidak ada lagi mungkin kita nanti tunggu jawaban tertulisnya dan kira-kira program afirmasi yang bisa menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di daerah.

Bapak Bambang silakan kalau ada yang mau ditambahkan.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

Mungkin saya langsung menanggapi dari Bapak Sarmuji dulu tadi, pertanyaannya kenapa reformasi structural itu seolah-olah problem berulang yang tidak pernah terselesaikan. Itu sama Pak, pandangan Bapak sama saya itu sama. Dari sejak saya di kampus sampai sekarang selalu bicara yang idealnya ada reformasi structural. Tapi kemudian saya pelajari ada beberapa problem yang membuat reformasi structural tidak mudah. Yang pertama, hampir pasti reformasi truktural tidak bisa terjadi hanya dalam satu masa Pemerintahan era setelah 1998. Jadi kalau kita lihat yang terjadi di Orde Baru dulu bisa terjadi karena cukup waktu. Sedangkan 5 tahun tidak cukup untuk bisa mengubah ekonomi secara structural dari yang berbasis komoditas menjadi yang berbasis nilai tambah, itu satu.

Yang kedua, yang paling penting juga kurangnya konsistensi dan kontinuitas di dalam kita melakukan reformasi tersebut. Katakan satu Pemerintahan sudah yakin bahwa industrialisasi harus diperkuat akan tetapi ketika harga komoditas naik maka semua orang berbondong-bondong kembali ke komoditas. Yang tadinya lebih senang membuat turunan CPO sekarang lebih senang ekspor CPO langsung, itu contoh kecil betapa hilirisasi saja tidak mudah. Hilirisasi itu boleh dibilang hanya jalan, satu karena bea keluar, kedua kalau mereka melihat prospek ekspor yang mentah langsung itu tidak bagus. Jadi begitu harga komoditas bagus maka pemikirannya langsung berubah total tidak lagi berpikir mengenai industry.

Yang ketiga, memang ini terkait struktur industry kita. Mau tidak mau kita harus invest untuk bisa meningkatkan sektor manufaktur. Satu, invest di infrastruktur karena biaya logistik kita masih dekat 30%. Kalau Bapak Sarmuji jadi pengusaha langsung dibebani biaya logistic, biaya yang melekat 30% pasti Bapak akan berpikir dua kali untuk masuk bisnis tersebut. Karena itu biaya logistic harus turun mendekati 10%. Itu artinya, butuh investasi infrastruktur. Yang kedua, investasi sumberdaya manusia yang pasti tadi sudah dibahas banyak. Yang ketiga, investasi di industry dasar, kita ini sekarang baik baja maupun petro kimia merupakan bisnis dasar, dua-duanya masih net importer, masih tergantung impor. Artinya, kita belum cukup invest membangun baik baja maupun petro kimia sebagai industry dasar dari proses industrisasi kita. Jadi itu hal-hal yang menurut saya memang harus dijaga konsistensi dan kontinuitas. Dan memang harus bisa diterima ini tidak bisa, ini mungkin tidak bisa sepenuhnya tercapai hanya dalam satu masa Pemerintahan.

Mengenai dana desa saya tambahkan dari Ibu Menteri Keuangan, kalau kita lihat perbaikan terjadi di gini coefficient turun dari 0,324 jadi 0,319 di desa. Angka kemiskinan turun meskipun masih di atas 13%. Nah, tapi mungkin Bapak Sarmuji ada data yang kemarin juga. Dari data potensi desanya BPS, tahun 2014 desa tertinggal, jadi desa ada 3 macam, desa tertinggal, berkembang dan mandiri. Yang paling maju pasti yang mandiri.

Tahun 2014 desa tertinggal 19.750 desa, pada tahun 2018 sudah turun menjadi 13.323 jadi 6.000 desa naik kelas dari tertinggal ke berkembang. Yang berkembang dari 51.026 naik menjadi 54.879, ini yang pindah dari yang tertinggal tadi sebagian. Kemudian desa mandiri naik cukup tajam dari 2.894 menjadi 5.559. Jadi ini mungkin salah satu aspek efektifitas dana desa, apakah dana desa alokasinya harus diperbaiki? Iya. Jadi mungkin porsi infrastrukturnya mulai berkurang, porsi pemberdayaan masyarakat yang mulai harus meningkat, supaya kontinuitas dari dana desa ini makin terus bermanfaat buat masyarakat setempat.

Nah, kemudian untuk Bapak Amirul Tamim hanya untuk menambahkan informasi tadi kami sudah sampaikan di 2019 ini ada rencana pelatihan sampai 1,4. Jadi sudah dianggarkan pelatihan untuk 1,4 juta vokasi yang berbasis kompetensi yang nantinya akan menghasilkan tenaga kerja tersertifikasi. Nah, itu tadi untuk menjawab konsen Bapak.

Nah, 150 ribu untuk konstruksi ya ini untuk menutupi tadi kekurangan sehingga kadang-kadang kita harus mendatangkan tenaga kerja asing. 50 ribu pariwisata, tadi Bapak bicara mengenai kurangnya lokal pariwisata. 160 ribu di bidang perhubungan

laut, udara, darat dan kereta api. 340 ribu di tenaga lainnya, baik untuk penunjang infrastruktur, industry dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kalau ini bisa dilakukan maka ini akan memberikan dampak untuk mengurangi kesenjangan tadi.

Nah, kemudian khusus untuk pariwisata bisa kami sampaikan saat ini kita punya 6 politeknik pariwisata, 18 BLK Pariwisata yang ada di seluruh Indonesia dan nantinya kita akan terus fokus kepada daerah-daerah yang dekat dengan tujuan wisata terutama yang belum punya seperti di Danau Toba atau di Labuan Bajo, itu yang harus mendapat fokus untuk pendidikan vokasi di Pariwisata, yang Sulawesi Tenggara juga, yang 10 daerah itu.

Nah, kemudian tadi ada konsen mengenai BLK memang saat ini dari 303 BLK hanya 19 yang punya Kemenaker, 284 itu milik Pemda. Nah, milik Pemda inilah yang banyak yang masih ketinggalan sehingga 2019 ini kita akan melakukan transformasi Diklat Vokasi di daerah untuk BLK daerah, sehingga mereka lebih bisa menjawab kebutuhan pasar bukan membuat kurikulum versinya sendirinya. Ini yang sedang dicoba dilakukan oleh Kemenaker.

Mengenai regenerasi pertanian, kuncinya memang harus pada intensifikasi. Peningkatan produktifitas tidak lagi berdasarkan jumlah tenaga kerja tetapi penggunaan alat mesin pertanian, pupuk, benih. Dan satu lagi yang berkembang sekarang, pertanian yang berkembang adalah yang berpola kemitraan langsung dengan pembeli akhir dan juga yang terkait dengan digital. Jadi semakin banyak petani sekarang terhubung dengan digital, baik untuk tehnik menanamnya maupun untuk pemasarannya. Sehingga memang akhirnya jumlah pekerja dipertanian terutama yang muda itu yang pindah, terutama pindahanya ada yang ke industry akan tetapi lebih banyak yang ke jasa. Jasa termasuk pariwisata maupun jasa perdagangan.

Yang lain terakhir mungkin Bapak Ketua, boleh ditayangkan sedikit supaya ini klarifikasi sedikit Bappenas yang halaman 16 kerentanan. Nah, ini mungkin Bapak Melchi yang bisa kami sampaikan yang miskin itu adalah yang warna biru dan hijau itu yang miskin, artinya yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan, itu yang biru dan yang hijau. Yang kuning itu adalah yang rentan miskin, jadi dia katagorinya tidak miskin tetapi kita anggap rentan, kenapa? Karena satu hal misalkan daerahnya banyak bencana alam, kalau daerah banyak bencana alam otomatis....

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR):

Interupsi Bapak Menteri Bappenas.

Bisa sampaikan kriteria rentan miskin itu *range*-nya itu berapa, apakah targetnya UMR, apakah patokan nominal.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Garis kemiskinan?

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR):

Iya, yang rentan miskin berapa penghasilannya.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Garis kemiskinan sampai 1,5 garis kemiskinan pengeluaran Pak. Kita semua basisnya pengeluaran, jadi yang biru itu adalah orang yang pengeluarannya antara garis kemiskinan sampai 0,8 garis kemiskinan yang biru Pak, itu yang disebut miskin. Yang hijau sangat miskin, sangat miskin itu berarti di bawah 0,8 garis kemiskinan. Nah, yang kuning rentan miskin itu adalah dari garis kemiskinan sampai 1,5 kali garis kemiskinan. Jadi kalau saya ambil contoh, misalkan di Jakarta per rumah tangga garis kemiskinannya 3,3 juta. Garis kemiskinan rumah tangga di Jakarta 3,3 juta, berarti yang kuning di Jakarta itu adalah dari 3,3 sampai 4,8 kira-kira itu adalah kelompok yang rentan miskin.

Tadi dikatakan oleh Kepala BPS, memang BPS tidak menghitung yang menghitung kami untuk keperluan perencanaan. Kenapa? Kita ingin menjaga jangan sampai jumlah orang miskin naik bukan karena orang miskin baru, tapi karena orang rentan jatuh ke miskin. Nah, kenapa orang yang dari kuning bisa jatuh ke biru, bisa karena bencana alam seperti kejadian di beberapa daerah belakangan ini. Kemudian kedua, kenaikan harga pangan jadi inflasi itu perlu untuk menjaga. Ketiga, penyakit apabila yang bersangkutan keluarganya sakit, yang mencari nafkah sakit. Yang keempat, yang kejadian luar biasa itu adalah kalau ada PHK misalkan, ada PHK baik karena masalah keluarganya ataupun karena pekerjaan. Jadi kita ingin menjaga rentan miskin ini sebagai bagian dari perencanaan.

Tadi kalau Bapak Melchi membandingkan NTT dengan Papua, kalau garis kemiskinan maksud saya jumlah penduduk miskin. Papua itu jumlahnya persentasenya maksud kami 27,4% paling tinggi di Indonesia Papua itu. Mungkin persentase dulu saya jawab 27,4 dan NTT 21,03% dan NTT nomor 3 di Indonesia.

KETUA RAPAT:

Nomor 3 apa Pak?

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Nomor 3 NTT dan nomor 2 Papua Barat.

KETUA RAPAT:

Termiskin?

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Nomor 3 termiskin.

KETUA RAPAT:

Nah, nomor 1 siapa Pak?

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Dari presentasinya Pak, kalau dari jumlah pasti di Jawa yang paling banyak.

KETUA RAPAT:

Nomor 1 nya siapa Pak, termiskin?

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Papua paling tinggi, presentase ya, karena kalau jumlah orang mau tidak mau.

KETUA RAPAT:

Jumlah kan beda, tapi kan sudahlah itu miskin kita tidak usah diumpet-umpet Pak.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Pak Menteri, mohon maaf Pak Menteri tadi ngomong-ngomong miskin ini. Tadi NTT nomor 3 secara ratio, secara presentase lalu *income* perkapita regionalnya itu berapa dan gini rasionya berapa, ini rasionya kayaknya 35%.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS :

Ini yang saya mau jawab.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Artinya itu apa Pak Menteri? Seluruhnya ramai-ramai miskin semuanya itu.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Saya ingin menjelaskan tadi pertanyaan Bapak Menchi, kenapa kerentanan di NTT lebih tinggi dari Papua.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, di NTT itu pilih Jokowi semua. Jadi tugas Bapak Jokowi itu bikin tidak jadi miskin nomor 3. Itu baru namanya janji politik, kerja politik, ini biar semua orang NTT dengar itu Pak.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Siap Pak, terima kasih Pak.

Mungkin Bapak Menchi dan Bapak Johnny kalau gini koefisien Papua 0,398 jadi di atas nasional. Jadi Papua itu timpang, NTT 0,359 di bawah nasional, lebih merata.

KETUA RAPAT:

Pak, ini sekalian jadi supaya ada afirmasi program untuk NTT yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, karena mereka dukung itu untuk supaya dijadikan itu, afirmasi Pak.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Iya, setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Afirmasi program, tolong nanti Bapak sampaikan kepada Bapak Jokowi. Saya kan tidak seperti Bapak Misbakhun ketemu Bapak Jokowi terus, saya tidak Pak. Saya titip kepada Bapak Bambang tolong sampaikan bahwa orang NTT minta tidak mau lagi nomor 3 termiskin.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Iya, siap Pak.

Mungkin tambahan sedikit, nanti di dalam jawaban tertulis kami akan sampaikan rencana kerja di NTT 2019 apa saja kegiatan yang akan berlangsung di NTT.

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Yang afirmatif Pak, jangan yang janji-janji.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Mungkin yang ada dulu nanti baru ditambah yang afirmatif.

Kembali ke gini, jadi yang menjelaskan Bapak Melchi kenapa jumlah yang rentan di NTT presentase lebih tinggi daripada Papua, karena di Papua karena ketimpangan setelah rentan miskin ini banyak yang langsung di atas. Nah, kita tahu itu entah dari mana tapi pokoknya mereka di atas sehingga....

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Kita bahasa terangnya saja itu bukan di wilayah pegunungan itu di wilayah perairan pesisir pantai. Jadi agak jelas juga bacanya, di pegunungan itu parah banget di Papua, ini ngomong jelas-jelas dulu.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:

Jadi intinya memang ketidak merataan di Papua itu yang membuat jumlah rentan di Papua secara presentase lebih rendah daripada NTT, karena NTT lebih merata dan seperti Bapak Johnny bilang memang meratanya pada *income* yang relative tidak terlalu tinggi karena dia masih berkumpul di kelompok rentan miskin.

Mengenai afirmasi nanti coba kita pikirkan dilihat dari, karena DAK ada 3 macam, ada DAK yang untuk standart pelayanan umum atau DAK untuk daerah yang terluar, tertinggal sama DAK yang penugasan. Kami akan coba di DAK Penugasan dan DAK yang 3T plus kita coba koordinasi terutama dengan Kementerian PU terutama mengenai jalan, karena bisa juga meskipun jalan provinsi itu bisa mungkin dibangun dulu oleh PU tapi kemudian nanti satu saat di hibahkan kepada daerah. Kita akan coba pikirkan cara-cara seperti itu yang mungkin diluar rutinitas atau kebiasaan.

Demikian Bapak Ketua.

F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):

Sebentar Bapak Ketua.

Pesan dua terhadap Bapak Menteri Bappenas.

KETUA RAPAT:

Ini buat DPD ini.

F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):

Pertama, tentang pemberdayaan masyarakat dana desa Pak Menteri. Untuk diketahui ya, pemberdayaan masyarakat itu merupakan celah korupsi dana desa. Contoh, inikan pengaduan masyarakat juga misalnya Ibu-ibu PKK diberi dana untuk belajar bikin kue bolu, disana belajar bikin kue itu tidak jelas itu RAB-nya. Jadi pesan saya, usul saya terhadap poin pemberdayaan masyarakat ini yang bagus ini harus jelas panduannya.

Yang kedua Ibu Menteri, begitu banyak kepala desa baru yang dilantik. Yang lama sudah mendapatkan pengetahuan, makanya saya minta ini menjadi perhatian bagi Dirjen Perimbangan.

KETUA RAPAT:

Ya ini Bapak Menteri, ini dana desa Pak, inikan pasti akan banyak proyek-proyek di desa. Nah, ini proyek-proyeknya saya tidak tahu tendernya pakai apa, tendernya secara manual atau by sistem. Karena faktanya di kabupaten yang sudah by sistem itu banyak celahnya untuk tidak menjadi by sistem. Nah, ini harus menjadi perhatian daripada Pemerintah Pak, kenapa bisa satu kontraktor dia sudah tahu bahwa dia yang menang. Kalau pakai sistem kan sistem semestinya yang menentukan si A yang menang, si B yang menang atau si C yang menang. Kenapa bisa belum ditender si A sudah yakin bahwa dia yang menang. Nah, ini bisa terjadi juga di desa Pak.

Nah, ini mungkin harus dipikirkan bagaimana celahnya, inikan angkanya semakin tinggi waktu pertama 20 triliun, 40 triliun sekarang sudah sekitar 60 triliun, 70 triliun. Nanti inikan semakin naik ini APBN dia akan naik Pak, karena itukan prosentase 2,6% dari APBN, kan 10% dari DAU dana desa itu.

Nah, ini harus mulai dipikirkan bagaimana supaya celah-celah ini tidak lagi orang masuk ke desa, cari duit disitu karena belum ada sistem, tendernya juga manual saja, akhirnya pindah itu korupsi dari pusat ke desa, karena di kabupaten pun masih terjadi itu.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian....

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Ini dan desa Pak Ketua, kita ingin mengingatkan saja ke Ibu Menteri. Ada 35 ribu desa tapi sudah hampir 1000 kepala desa bermasalah dari dana desa yang kena kasus hukum. Jadi vokasi pelatihan-pelatihan itu perlu sekali, apalagi tadi yang Ibu Elviana sampaikan ada banyak juga kepala desa baru. Kepala desanya yang baru ini, ini masalahnya cukup serius.

Desa-desa saat ini, ini lagi *happy-happy*-nya lagi *happy* mereka, ada banyak dana yang masuk 100 juta paling kurang sebulan dana yang beredar. Paling kurang kan Ibu, berarti dia akan lebih dari itu. Kalau sekitar 1 miliar dari dana desa, dari ABD-nya pasti di tambah ya. 800 juta dibagi 12 sekitar segitu yang setiap bulannya dan itu cukup banyak, tapi kalau sampai tidak ada pelatihan mereka itu bisa bermasalah. Masalah yang paling utama nanti mereka takut untuk serap. Kalau ada ketakutan untuk serap ini jadi masalah kita.

Yang kedua, mereka perlu paham betul dari awalnya alokasi dan penggunaan dana desa. Bagaimana untuk menggunakan sumber daya yang ada di desa itu, *resources* yang ada di desa. Jangan sampai sistemnya sistem kontrak lagi ke desa yang lain atau bahkan ke kota, lalu tujuan kita mereka menerimakan hasilnya tapi

partisipasi langsung mereka agak kurang. Ini perlu menjadi perhatian kita, karena dana desa juga salah satu faktor pendorong untuk penciptaan lapangan kerja di desa-desa di Indonesia.

Ini catatan saja Ibu Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sudah tidak ada catatan lagi ya Pak?

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Saya bacakan kesimpulan rapat pada sore hari ini.

Rancangan kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala BPS, tanggal 16 Januari 2019.

1. Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala BPS untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2019, sesuai dengan asumsi makro yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 5,3%.

Kan itu di APBN kan, jadi mestinya iya dong.

Bagaimana teman-teman? Ibu Menteri?

MENTERI KEUANGAN RI:

Mungkin untuk Kepala BPS tidak dimasukkan kesitu, nanti dia malah menukangi statistik.

KETUA RAPAT:

Iya benar, Kepala BPS kan hasilnya saja. Jadi Kepala BPS-nya hilang ya, jadi "Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sesuai dengan asumsi makro yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 5,3%".

Setuju ya Pak?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan untuk meningkatkan tax ratio pada tahun 2019, sehingga meningkatkan kemampuan APBN dalam membiayai pembangunan.

Kalau penerimaannya naik kan tax rasionya pasti naik, jadi jangan sampai

penerimaannya turun lagi, turun lagi nanti tahun 2019.
Jadi bisa disetujui Ibu ya nomor dua ya.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi XI DPR RI meminta Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan langkah mitigasi terhadap kemungkinan pelemahan nilai tukar Rupiah tahun 2019, sehingga dapat menjaga momentum pertumbuhan dunia usaha.
Silakan Pak.

GUBERNUR BANK INDONESIA:

Kalau boleh usul untuk melakukan langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah Pak, mungkin lebih baik. Karena memang untuk dunia usaha kan stabilisasinya yang paling penting. Stabilisasi nilai tukar Rupiah, Itu bisa dipotong sampai dengan, tahun 2019 masih boleh.

KETUA RAPAT:

Jadi nomor 3 adalah “Komisi XI DPR RI meminta Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah di tahun 2019, sehingga dapat menjaga momentum pertumbuhan dunia usaha”.
Bisa setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala BPS untuk memberikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lambat hari Senin, 21 Januari 2019.
Bisa disetujui ya?

F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):

Bapak Ketua, ada kurangnya itu khususnya yang terkait pertanyaan di NTT tadi itu Pak. Bapak Ketua lupa ya?

KETUA RAPAT:

Pokoknya tadi bukan ini, sampainya tadi bukan Cuma ke Bapak Menteri tapi Pak Jokowi. Orang NTT-nya sudah bilang tadi 85% tapi bangun juga dong di NTT.
Bisa disetujui ya nomor 4 ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Terima kasih atas kehadiran Rapat Kerja pada sore hari ini. Semoga apa yang bisa kita bicarakan ini bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Kami persilakan Ibu Menteri, closing remaks.

MENTERI KEUANGAN RI:

Pimpinan dan Wakil Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi XI DPR RI.

Kami terima kasih bulan Januari 2019 ini kita mulai dengan Rapat Kerja untuk bisa pertama memahami apa yang sudah terjadi di tahun 2018. Dan tentu untuk mengawal tahun 2019 dari sisi perekonomian, kami tentu akan mengusahakan seluruh instrument yang ada di dalam kewenangan kita untuk bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat seperti tadi yang disampaikan. Dan kita tentu mengharapkan untuk terus terjaga hubungan yang baik dengan Komisi XI DPR RI.

Terima kasih atas masukan dan pandangan-pandangan serta tentu tugas-tugas yang memang seharusnya dilakukan oleh kami dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di semu pelosok Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kepada Pemerintah atas kehadiran dan pemaparan serta jawaban dan kami akan tunggu jawaban tertulisnya.

Dengan demikian Rapat Kerja saya tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.03 WIB)

Jakarta, 16 Januari 2019

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soediarwono
NIP. 19620521 198203 1 001**